



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

ROAD MAP

**REFORMASI BIROKRASI
2023 - 2024**



“Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode Pemerintahan saya, maka capaian yang baik mari kita pertahankan dan yang belum mari kita tuntaskan”

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas kesempatan, rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penyusunan perubahan atau penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan 2021 – 2025 selesai disusun. Hal ini sesuai dengan Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB Nasional Sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah melakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB nomer 3 tahun 2023.

Adapun tujuan dari perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan yaitu menyelaraskan dengan perubahan atas Road Map RB Nasional serta diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB. Melalui strategi RB yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan adalah Pedoman pelaksanaan proses tiada henti Reformasi Birokrasi di Kota Pasuruan, yang menjadi panduan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kota Pasuruan, sehingga memudahkan untuk memahami langkah-langkah yang akan dilakukan dan dapat diketahui secara cepat berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Semoga kita dapat mengemban amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Reformasi Birokrasi di Kota Pasuruan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*).

Kota Pasuruan, 28 April 2023

WALIKOTA PASURUAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional telah disusun melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Namun demikian dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi bahwa beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah melakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Sejalan dengan kondisi tersebut tersebut Pemerintah Kota Pasuruan juga melakukan penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 Kota Pasuruan.

Tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026 yaitu Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Daerah dan pelayanan public dengan indikator: 1) Indeks RB; 2) Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan); 3) Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Pertumbuhan Investasi). Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026: 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif dengan indikator Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, dan Capaian Akuntabilitas Keuangan; 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional dengan indikator Nilai Survei Employer Branding, Nilai Survei Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Penilaian Integritas dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Adapun kegiatan utama mandatory telah ditetapkan sebanyak 21 kegiatan utama. Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Tematik Nasional yang telah ditetapkan, Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pasuruan juga

menetapkan 5 tema yaitu: 1) Pengentasan Kemiskinan; 2) Peningkatan Investasi; 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; 4) Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN); 5) Pengendalian Inflasi.

Pelaksana Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi termasuk pemerintah daerah. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Evaluasi berfokus pada Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Output dan Outcome). Monitoring dilakukan secara tribulan dan evaluasi akan dilakukan secara tahunan. Monitoring dilakukan melalui forum monev bersama dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Evaluasi dilakukan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspektorat yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Road Map RB	1
1.2 Tujuan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi	5
1.3 Dasar Hukum	5
BAB II GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH	7
2.1 Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024.....	7
2.2 Capaian RB Kota Pasuruan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kondisi eksisting Kota Pasuruan sesuai dengan Perubahan Road Map RB 2020-2024	12
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 25	
3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran RB	28
3.2 Perencanaan RB General.....	35
3.3 Penetapan Tema dan target RB Tematik	41
BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN RB.....	49
4.1 Pelaksanaan RB.....	49
4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB.....	54
BAB V PENUTUP.....	55
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tujuan, Indikator dan Target Road Map RB Kota Pasuruan 2021-2025	29
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Road Map RB Kota Pasuruan 2021-2025	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Trand Nilai Capain RB Kota Pasuruan 2018-2022	13
Gambar 2. 2 Trand Capaian Nilai Komponen Pengungkit RB Kota Pasuruan 2018-2022	21
Gambar 2. 3 Trand Nilai Capain RB Kota Pasuruan 2018-2022	Error!

Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Adapun gambaran *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Tahapan Pencapaian Sasaran Lima Tahunan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Sumber : Perpres 81 tahun 2010

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi perjalanan Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service (Governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

Panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional telah disusun melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Namun demikian dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi bahwa beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat

yang secara langsung dirasakan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut pemerintah melakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi .

Beberapa aspek utama yang telah ditajamkan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan

strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.

3. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Penajaman terhadap berbagai aspek utama tersebut menjadi dasar juga atas desain pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode ketiga yang kemudian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Menindaklanjuti perubahan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memberikan surat edaran nomor B/98/RB.00/2023 diharapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar mengimplementasikan berbagai hal yang termuat dalam Permenpan Nomor 3 tahun 2023. Secara khusus salah satu yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi instansi perlu menyesuaikan

dengan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional. Hal-hal yang perlu ditetapkan dalam penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yaitu 1) Isu strategis dan capaian Reformasi Birokrasi maupun capaian pembangunan instansional (mikro); 2) Tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi instansional (mikro); 3) Kegiatan utama RB General termasuk target tahunannya; 4) Tema RB Tematik termasuk targetnya; serta 5) Manajemen/ pengelolaan Reformasi Birokrasi instansional (mikro). Merujuk pada perubahan kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan arahan yang telah diberikan menjadi dasar pula bagi Pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyesuaian dan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 Kota Pasuruan yang akan dicapai pada dua (dua) tahun yaitu 2023-2024.

1.2 Tujuan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi

Adapun tujuan dari perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyelaraskan dengan perubahan atas Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
- 2) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
- 3) Menjadikan Road Map Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Menjadikan Road Map Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2025 Kota Pasuruan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1 Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024

Pada Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 dijelaskan berbagai isu strategis Reformasi Birokrasi Nasional yang mempengaruhi konstruksi penajaman Road Map Reformasi Birokrasi. Adapun berbagai isu strategis tersebut dibagi kedalam dua kategori yaitu tingkat hulu dan hilir.

2.1.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi

sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu

melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala.

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh

kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.1.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor

yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan

masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

2.2 Kondisi eksisting Kota Pasuruan sesuai dengan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional memberikan implikasi terhadap perubahan pada Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya. Adapun tujuan yang telah ditetapkan pada perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public dengan indikator:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi);
3. Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI).

Terdapat 2 sasaran strategis RB yang telah ditetapkan didalam perubahan road map Reformasi Birokrasi Nasional yaitu sebagai berikut:

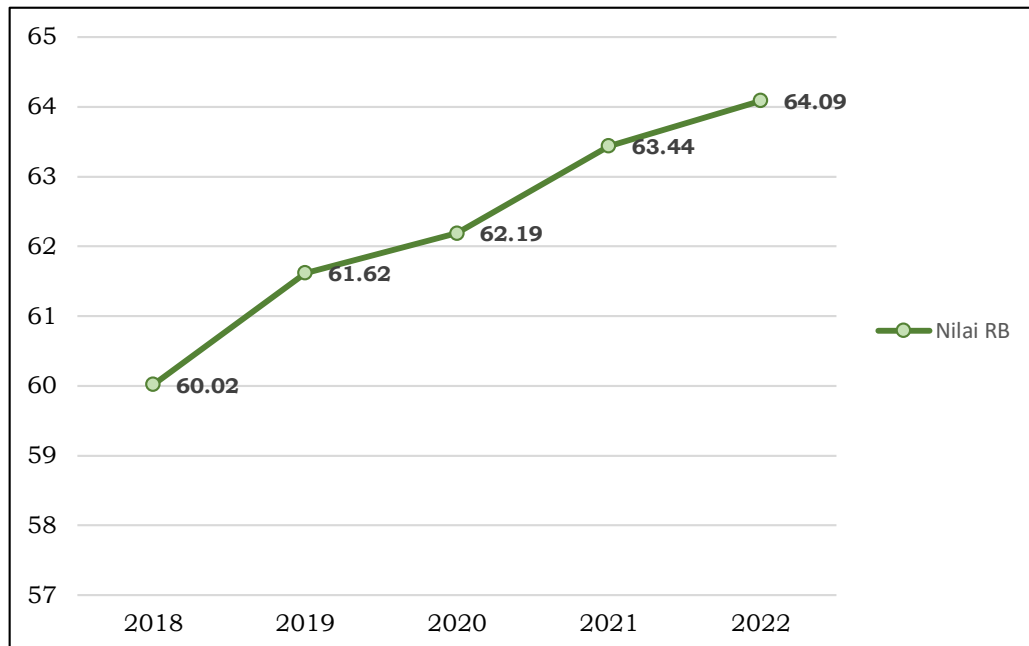
1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel dengan indikator:
 - a. Indeks SPBE;
 - b. Capaian Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Capaian Akuntabilitas Keuangan.
2. Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional dengan indikator:
 - a. Nilai Survei Employer Branding (sumber: Kementerian PANRB)
 - b. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)
 - c. Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)

d. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Kementerian PANRB)

Adapun kondisi exsisting Kota Pasuruan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut:

1) Capain Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan

Pembangunan Reformasi Birokrasi di Kota Pasuruan terus menjadi perhatian dan fokus perbaikan dari tahun ketahun. Berbagai upaya reform telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendorong dan menciptakan birokrasi kelas Dunia sejalan dengan arah pembangunan Reformasi Birokrasi Nasional. Sejak tahun 2018 capain hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan nilai 1 poin setiap tahun. Adapun *trend* kenaikan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB sejak tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada gambar



berikut:

Gambar 2. 1 Trand Nilai Capain RB Kota Pasuruan 2018-2022

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2018-2022

Berbagai aspek yang telah menjadi capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan hingga tahun 2022 diantaranya yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan sosialisasi penguatan budaya kerja Core Value BerAKHLAK kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) dan mendorong Agen Perubahan yang dimiliki untuk ikut serta pada kegiatan INOTEK (Inovasi Teknologi) yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) di tingkat regional yang diadakan oleh Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur, Dilain kesempatan Pemerintah Kota Pasuruan juga mengikuti KIPP (Kompetisi Inovasi Penyelenggara Pelayanan Publik) yang diadakan oleh MenpanRB. Sedangkan di tingkat Kota, untuk mendukung kegiatan tersebut diatas , telah dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOLABIK) yang di ikuti oleh 154 unit pelaksana pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
- 2) Telah melakukan indentifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus;
- 3) Telah melanjutkan proses penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pelantikan berdasarkan hasil penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan pada bulan Desember 2021;
- 4) Telah melakukan perbaikan sistem manajemen SDM dengan mengintegrasikan aplikasi SIJAJA (Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja) dengan SIMASKOT (Sistem Manajemen ASN Kota Pasuruan) yang sudah ada sebelumnya;
- 5) Pemerintah Kota Pasuruan telah berupaya menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kota Pasuruan yang naik predikat BB;

- 6) Telah menyusun kebijakan berupa Standart Operasional Prosedur (SOP) pemberian kompensasi bagi penerima layanan dan sedang menyusun draft Peraturan Walikota terkait Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi terkait pelayanan publik di Pemerintah Kota Pasuruan;
- 7) Pemerintah Kota Pasuruan telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai bagian dari proses integrasi sistem pelayanan publik di Kota Pasuruan;
- 8) Telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan juga sejalan dengan peningkatan atas komponen yang telah dinilai dalam Reformasi Birokrasi yaitu terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Adapun capaian dari komponen pengungkit dan hasil disajikan sebagai berikut:

2.2.1 Capaian Komponen Pengungkit

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Kategori-kategori pengungkit menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih

adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

- a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang semakin meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman;
 - c. Menurunnya resistensi terhadap perubahan;
 - d. Budaya perubahan yang semakin melekat (*embedded*) pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakan deregulasi kebijakan, kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya kapasitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Terciptanya desain organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendukung kinerja;
- d. Berkurangnya jenjang organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

4. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE

untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional;
 - c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan;
 - d. Meningkatnya kinerja di kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

- a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawai terhadap kinerja dibandingkan sekedar kerja rutinitas semata;
- b. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengelola kinerja organisasi;
- c. Meningkatnya kemampuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi;
- d. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

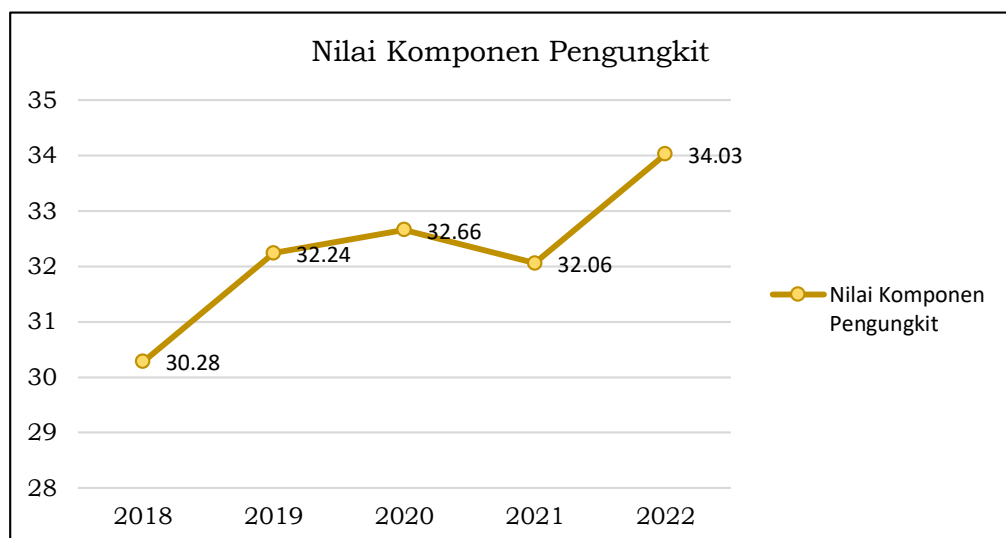
- c. Meningkatkan sistem integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam upaya pencegahan KKN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada komponen pengungkit capaian Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan juga telah menunjukkan trend yang mengalami peningkatan. Adapun capaian pada komponen pengungkit sejak tahun 2018 hingga 2022 disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Trand Capaian Nilai Komponen Pengungkit
RB Kota Pasuruan 2018-2022**

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2018-
2022

Selain komponen pengungkit, terdapat juga 9 (sembilan) hasil antara Pemerintah Kota Pasuruan yang telah dilakukan pengukurannya oleh instansi leading sector, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Hasil Antara Kota Pasuruan

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	175,5	256,5	KASN
2	ASN yang Profesional	0-100	38,95	51,74	BKN
3	Implementasi SPBE	0-5	1,83	2,66	Kementerian PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20,28	38,5	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,09	4,14	Kementerian PANRB
6	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
7	Kapabilitas APIP	0-5	2	2	BPKP
8	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	56,16	77,42	Ombudsman Republik Indonesia
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	59,97	74,87	ANRI

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2022

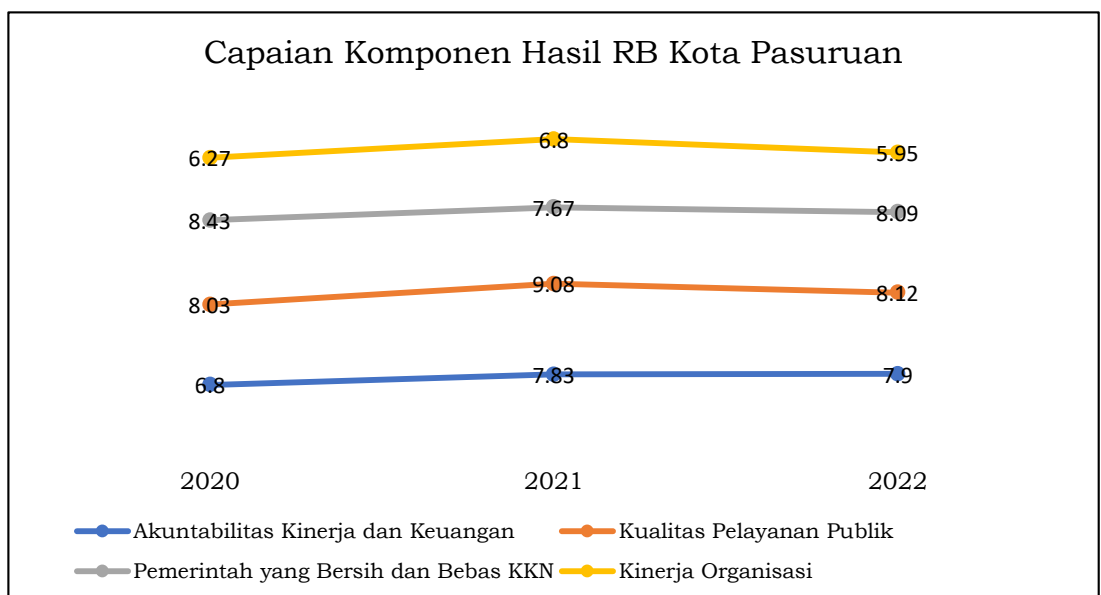
2.2.2 Capaian Komponen Hasil

Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan model Pengungkit sampai dengan Hasil di atas, yang menjadi bagian dari Komponen Hasil dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
 - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
2. Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP);
3. Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
4. Kinerja Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
 - a. Capaian Kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. Capaian Kinerja Lainnya;
 - c. Survei Internal Organisasi.

Adapun capaian dari komponen hasil Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB 2020-2022

2) Capaian Nilai Survei Indeks BerAKHLAK

Budaya birokrasi BerAKHLAK masih kurang terimplementasi dengan baik di Kota Pasuruan. Adapun kondisi atas hasil penilaian Indeks implementasi BerAKHLAK Kota Pasuruan tahun 2022 yaitu sebesar 61,8 dengan kategori cukup sehat atau Baik. Sedangkan untuk pemetaan dan pengukuran budaya kerja hasil penilaian MenpanRB untuk Kota Pasuruan yaitu 71 dengan kategori cukup sehat atau Baik.

Core Value BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator pengungkit. Pada prinsipnya Kota Pasuruan telah melaksanakan langkah-langkah guna menunjang program Pemerintah agar lebih mengenalkan dan memahami Core Value ASN BerAkhlaq melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah di Launching Core Value ASN BerAKHLAK yang dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Propinsi Jawa Timur, Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta Sekretaris Perangkat Daerah.
- b. Mengimplementasikan Core Value ASN BerAKHLAK kepada seluruh Perangkat Daerah melalui Surat Edaran Kepala Daerah yang berisi instruksi agar setiap Perangkat daerah melaksanakan internalisasi Berakhlak secara utuh tanpa mengurangi ataupun melebihi core Value Berakhlak sebagai panduan perilaku sehari-hari, menginternalisasi

secara paralel agar meningkatkan kesadaran terhadap penggunaan logo “Berakhlak” dan tagar bangga melayani bangsa dalam bentuk poster,twibbon,bahan paparan,konten media sosial, dan latar virtual/ background, penyisipan informasi Berakhlak didalam setiap rapat, apel, pertemuan,sosialisasi dsb.

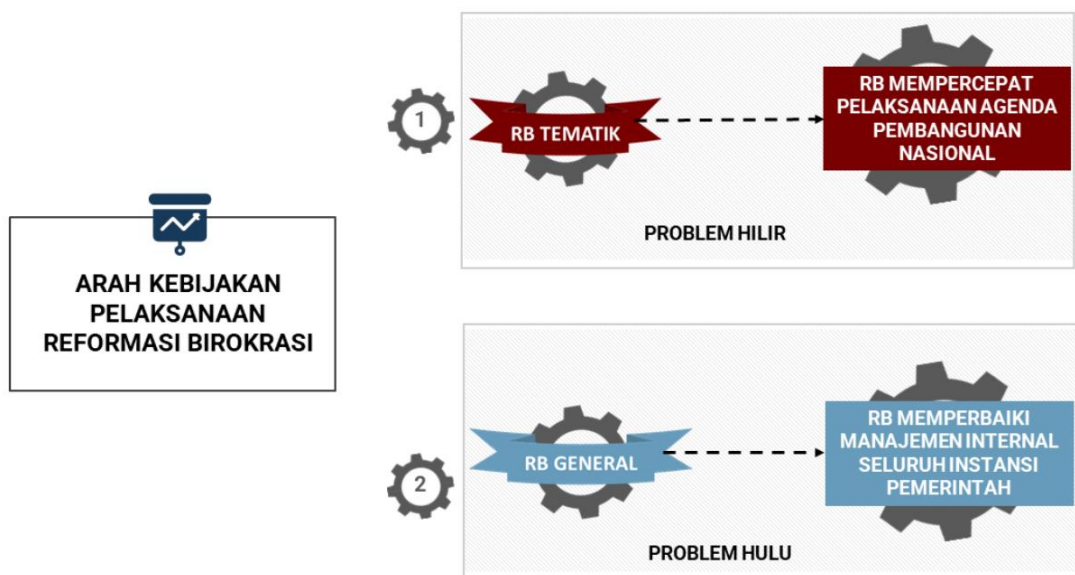
- c. Peningkatkan pengetahuan ASN Kota Pasuruan dalam hal ini Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) ASN yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2023 untuk lebih menekankan akan arti BerAKHLAK kepada seluruh ASN Kota Pasuruan.
- d. Penguatan nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan melalui workshop aktivasi Core Value ASN BerAkhlaK serta penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka mengawal secara bersama-sama kepatuhan dan pemahaman sehingga nilai BerAKHLAK dapat merata pada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian issue hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga issue hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map Reformasi Birokrasi 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik. Double Track Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Double Track Fokus Pelaksanaan RB



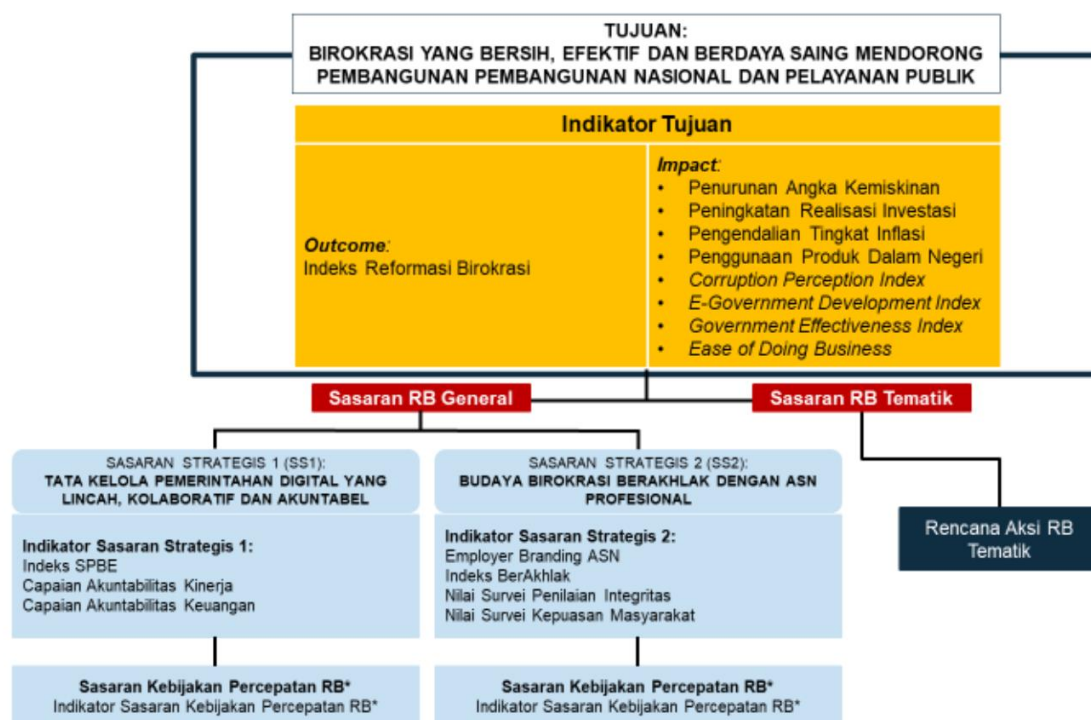
Sumber: Peraturan Menteri PANRB No. 3 tahun 2023

Selain itu pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan- kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang mana perlu dipastikan keberlanjutannya.

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi juga dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Untuk menunjukkan efektivitas Reformasi Birokrasi dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari

adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator Reformasi Birokrasi dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (output) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 2 Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman

Sumber: Peraturan Menteri PANRB no 3 tahun 2023

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi instansi pemerintah mengikuti Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, namun demikian tetap diperbolehkan jika ada inisiatif tambahan terkait dengan isu pembangunan. Adapun penetapan Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan ditetapkan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional.

Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan Reformasi Birokrasi Nasional diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi Nasional yang telah ditetapkan maka pada perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026 yaitu “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Daerah dan pelayanan public”. Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan sekaligus juga ditetapkan indikatornya sejalan atau inline dengan penetapan pada indikator tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 beserta targetnya yang disajikan pada table berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Indikator dan Target Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026

Tujuan RB Nasional 2020-2024	Indikator Tujuan RB Nasional	Tujuan RB Kota Pasuruan 2021-2026	Indikator Tujuan RB Kota Pasuruan	Baseline 2022	Target 2024	Target Nasional
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Daerah dan pelayanan public	Indeks RB	Baik (nilai 64,09)	67,56	70% Kab/Kota Minimal Baik
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan)	6,37	5,37	Menurun
	Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Pertumbuhan Investasi)	2,03%	2,8%	Meningkat

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2023

Berkaitan dengan sasaran pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Sasaran strategis Reformasi Birokrasi Nasional menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan setelah perubahan. Selaras dan inline serta mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkanlah sasaran strategis Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026 sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.

Sasaran strategis ini menjadi aspek *hard element* yaitu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan di daerah dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Sasaran strategis ini menjadi aspek *soft element* yaitu berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di daerah serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Sasaran strategis Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan sekaligus juga ditetapkan indikatornya sejalan dengan penetapan pada indikator sasaran strategis dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 beserta targetnya yang disajikan pada table berikut:

**Tabel 3. 2 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan
2021-2026**

No	Sasaran Strategis RB Nasional 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Strategis RB Kota Pasuruan	Indikator	Baseline 2022	Target 2024	Target Nasional	Sumber Data
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Indeks SPBE	2,66	2,95	50% Kab/Kota Baik	Kementerian PANRB
		Capaian Akuntabilitas Kinerja		Capaian Akuntabilitas Kinerja	70,4 (BB)	BB	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah minimal Baik	Kementerian PANRB
		Capaian Akuntabilitas Keuangan		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	100% kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	BPK
2	Terciptanya budaya birokrasi	Nilai Survei Employer Branding	Terciptanya budaya birokrasi	Nilai Survei Employer Branding	71,2	75	7,66%	Kementerian PANRB

	BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	61,8	73	67,142%	Kementerian PANRB
		Nilai Survei Penilaian Integritas		Nilai Survei Penilaian Integritas	71,4	72,12	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat	KPK
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,51	86	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah meningkat	Kementerian PANRB

Sumber: Kota Pasuruan, 2023.

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Nasional setelah penajaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di level mikro, terdapat beberapa tahapan dalam Pembangunan Reformasi Birokrasi General, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi internal.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Nasional dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN (Tim Reformasi Birokrasi Nasional). Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing pemerintah daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan masing-masing pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pada tahap ini, dalam hal pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya, maka pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi tingkat prioritas seluruh Kegiatan Utama. Dalam melakukan identifikasi tingkat prioritas perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Kegiatan Utama mandatory bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan Kegiatan Utama inisiatif dari Pemerintah Daerah;
2. Seluruh Kegiatan Utama, baik yang mandatory maupun inisiatif Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan indikator yang terukur;
3. Identifikasi prioritas Kegiatan Utama didasarkan pada empat faktor yaitu Mandat Reformasi Birokrasi General Nasional, Tingkat Keparahan (implementasi rendah), Waktu (Mendesak), dan Skala Prioritas (Total Skor), atau lebih jika ada faktor lain yang dirasa perlu oleh Pemerintah Daerah;
4. Skor masing-masing faktor dalam skala 1-10 (atau skala lainnya), kemudian diakumulasi;

5. Hasil identifikasi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam menetapkan target tahunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Adapun hasil identifikasi prioritas Kegiatan utama Mandatory Kota Pasuruan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional (1-10)	Tingkat Keparahatan (1-10)	Waktu	Skala Prioritas (Total Skor)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel					
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile)	10	2	5	27
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	10	9	29
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	4	7	21
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	6	23
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	10	10	30
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	8	10	28

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional (1-10)	Tingkat Keparahan (1-10)	Waktu	Skala Prioritas (Total Skor)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	7	10	27
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	7	9	27
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	8	8	26
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	8	8	26
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	7	7	24
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	7	8	25
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	7	7	24
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional					
1	Penataan Jabatan Fungsional	10	5	5	20
2	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	7	7	24
3	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	6	7	23
4	Penguatan Sistem Merit	10	6	8	24
5	Pelaksanaan Core Values ASN	10	5	10	25
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	8	10	28

Sumber: Kota Pasuruan, 2023

Setelah prioritas kegiatan utama ditetapkan, selanjutnya ditetapkan target dari kegiatan utama beserta Koordinator dan pelaksana dari kegiatan utama. Koordinator adalah unit/satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal dan mengkoordinir Kegiatan Utama. Pelaksana adalah unit/satuan kerja yang perlu melaksanakan Kegiatan Utama. Adapun target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4 Penetapan Target Kegiatan Utama Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026**

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline 2022	Target		Unit / Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	n.a	25%	75%	Bagor	Seluruh PD
2	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2	3	3	Inspektorat	Seluruh PD
3	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0	5	10	Inspektorat	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,66	2,81	2,95	Diskominfo	Seluruh PD
5	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100	100	100	Diskominfo	Seluruh PD
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,51	85	86	Bagor	Seluruh PD
7	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile)	Indeks Pelayanan Publik	4,14	4,2	4,3	Bagor	Seluruh PD

8	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	71,4	71,76	72,12	Inspektorat	Seluruh PD
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n.a	50	70	Bakum	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	D	B	B	Bakum	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	BB	BB	BB	Dispersi p	Seluruh PD
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	38,5	60	75	BLP	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	61,8	70	73	BKD	Seluruh PD
		Employee Branding*	71,2	73	75	Bagor	Seluruh PD
14	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	n.a	B	B	Diskominfo	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKA	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	n.a	75%	100%	Insepektorat	Seluruh PD
16	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	n.a	50%	70%	BKD	Seluruh PD
17	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	256,5	280	300	BKD	Seluruh PD
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	n.a	50%	50%	DPMPPTS P	Seluruh PD

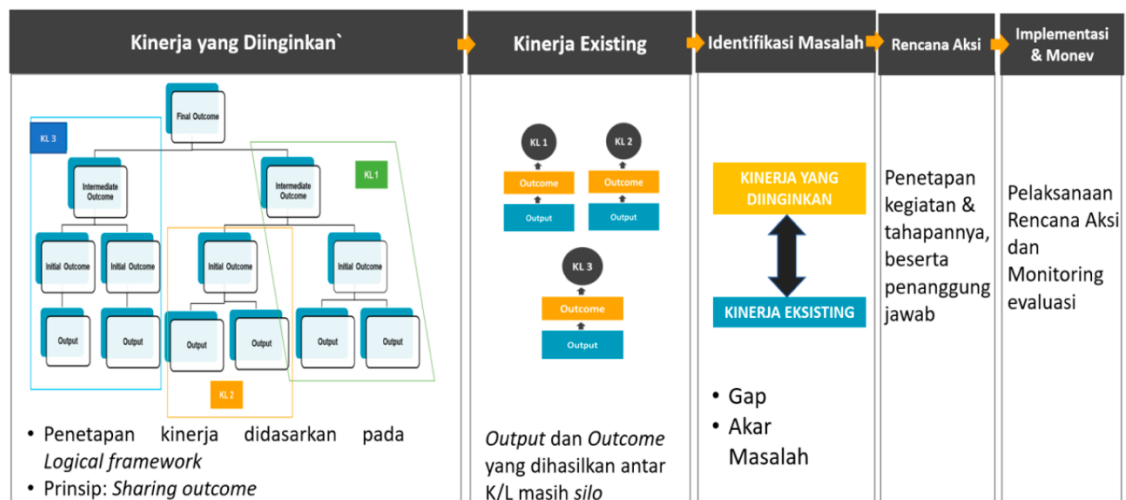
19	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	n.a	75 (SEDANG)	75 (SEDANG)	BKD	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	n.a	-	-	Bappelit bangsa	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	BB	BB	BB	Bagor	Seluruh PD
21	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	n.a	50%	70%	BKD	Seluruh PD

Sumber: Kota Pasuruan, 2023

3.3 Penetapan Tema dan target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik. Ditingkat Nasional, Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (leading sector) maupun instansi pelaksana (implementing agency). Sedangkan non-implementing agency merupakan kementerian/lembaga selain implementing agency dan leading sector yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis Reformasi Birokrasi Tematik yang telah disusun didalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 Kerangka Logis Reformasi Birokrasi Tematik Makro
Sumber : Peraturan Menteri PANRB no 3 tahun 2023

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, maka ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

- 1) Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2) Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.

4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih satu atau lebih dari empat tema yang akan diangkat sebagai fokus RB Tematik. Dalam menetapkan tema, instansi pemerintah perlu berangkat dari *evidence* berupa data yang kuat dan relevan (*evidence based policy*). Data merupakan komponen penting pada tahap ini karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tema. Data yang digunakan dapat berupa data primer maupun sekunder, baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah.

Metode yang digunakan adalah melalui evaluasi terhadap kinerja diinginkan yang dibandingkan dengan kinerja existing. Setelah melakukan identifikasi terhadap kinerja yang diinginkan dengan kinerja existing yang ada, maka selanjutnya adalah memperhatikan gap yang muncul dari kedua kinerja/kondisi tersebut. Keberhasilan Pelaksanaan RB Tematik tidak terlepas dari kemampuan instansi pemerintah dalam mengenali adanya permasalahan kesenjangan antara kinerja yang sudah ada dengan kinerja yang akan dicapai dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Sejalan dengan Reformasi Birokrasi Tematik Nasional yang telah ditetapkan, maka Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pasuruan juga menetapkan 5 (lima) tema sebagai berikut:

1. Tema Pengentasan Kemiskinan;

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-sektor. Tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah besarnya anggaran terkait penanggulangan kemiskinan belum memberikan dampak signifikan pada besaran penurunan kemiskinan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum menjangkau target yang tepat. Dengan adanya target kemiskinan 7% pada 2024 dan target kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024, maka diperlukan kolaborasi dan sinergi program penanggulangan kemiskinan di daerah. Peran atau dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada isu tematik penanggulangan kemiskinan adalah dengan mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurunan kemiskinan. Secara lebih spesifik, RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat dalam penentuan sasaran ataupun penyediaan dukungan sarana dan prasarana, seperti penyediaan infrastruktur dan IT.

2. Tema Peningkatan Investasi;

Investasi menjadi katalisator pada Pembangunan Nasional serta mendukung pencapaian nilai positif dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan kenaikan investasi, maka PDB pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Berbagai tantangan dalam peningkatan investasi kerap kali dihadapi. Reformasi Birokrasi Tematik focus pada peningkatan investasi ini berperan dalam mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dimana intervensi dan perbaikan aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan

regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.

3. Tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA menuntut birokrasi bekerja secara agile, adaptive dan cepat. Selain tuntutan global, kesadaran masyarakat akan pentingnya percepatan dan kemudahan pelayanan publik menjadi perhatian utama masyarakat. Peningkatan Digital Kultur diartikan sebagai pencapaian birokrasi yang memiliki mindset baru bahwa prioritas kerja adalah pada hasil (*outcome*), mekanisme kerja dapat dilakukan secara fleksibel dalam konteks ruang dan waktu, serta jangkauan kolaborasi yang menembus sekat-sekat organisasi maupun hierarki. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, salah satunya penanganan stunting.

4. Tema Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN);

Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif (tepat sasaran), efisiensi, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya adalah dengan mendominasi e-katalog pengadaan barang/jasa dengan produk buatan dalam negeri. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka instansi pemerintah diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling

sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka instansi pemerintah diharapkan telah menggunakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi minimal sebanyak 40%.

5. Tema Pengendalian Inflasi.

Reformasi Birokrasi berfokus pada upaya dan inovasi pemerintah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah. Inflasi merupakan indikator makro perekonomian yang menggambarkan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan kurang sehat. Hal ini dikarenakan kenaikan harga-harga barang secara umum berimplikasi pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta bekerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, menjadi salah satu keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Adapun penetapan tema Reformasi Birokrasi Tematik Kota Pasuruan 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Penetapan Target Reformasi Birokrasi Tematik
Kota Pasuruan 2021-2026**

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan, indeks kedalaman (P1) dan keparahan	6,37	5,65	5,37

No	Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target	
					2023	2024
			kemiskinan (P2)			
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (Jumlah PMDN dan PMA)	2,03%	2,4%	2,8%
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Angka Stunting	n.a	16%	14%
4	Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN)	n.a	90%	95%
5	Pengendalian Inflasi	Menurunnya tingkat Inflasi daerah	Tingkat Inflasi (YoY)	5,45	3,0	2,5

Sumber: Kota Pasuruan, 2023

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksana Reformasi Birokrasi di level mikro merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh instansi termasuk pemerintah daerah. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;

2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Pemerintah Daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Kota Pasuruan sendiri telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/xx/423.011/2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari a) Tim RB General; b) Tim RB Tematik; dan c) Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan disajikan pada table berikut:

**Tabel 4.1 Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DAAM JABATAN
1	2	3
A	TIM STU/KESEKRETARIATAN 1. Ketua 2. Anggota	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten 1 Asisten 2

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DAAM JABATAN
1	2	3
B	TIM RB GENERAL 1. Ketua 2. Anggota	Asisten Administrasi Umum (Asisten 3) 1. Kepala Bapelitbangda 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangann dan Aset 3. Inspektorat 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 5. Kepala Dinas Komunikasi informasi dan statistik 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan 7. DPMPTSP 8. Kepala Bagian Organisasi 9. Kepala Bagian Hukum 10. Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa
C	TIM RB TEMATIK PENANGANAN KEMISKINAN 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Bapelitbangda 1. Kepala Dispendik 2. Kepala Dinas sosial 3. Kepala Disnaker 4. Kepala Diskominfo 5. kepala Dinkop 6. Kepala DPMPTSP 7. Kepala Dinas PUPR 8. Camat dan Lurah
	PENINGKATAN INVESTASI 1. Ketua 2. Anggota	Kepala DPMPTSP 1. Kepala Disperindag 2. Kepala Dinas Pertanian 3. Kepala Disnaker 4. kepala Dinkop 5. Kepala Perikanan 6. Kabag Hukum
	PENANGANAN INFLANSI 1. Ketua	Bagian Perekonomian

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DAAM JABATAN
1	2	3
	2. Anggota	1. Kepala Disperindag 2. Kepala Dinas Pertanian 3. Kepala Dishub 4. kepala Dinkop 5. Kepala Perikanan 6. Kepala Dinas PUPR 7. Kepala diskominfo 8. inspektorat
	DIGITALISASI (PENANGANAN STUNTING) 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Kepala Dispendik 2. Kepala Dinas sosial 3. Kepala DPA3KB 4. Kepala Diskominfo 5. Kepala Dinas Perikanan 6. Kepala Pertanian 7. Kepala Dinas PUPR 8. Camat dan Lurah
	P3DN 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan 1. Kepala Dinas Pertanian 3. kepala Disnaker 4. kepala Dinkop 5. Kepala Perikanan 6. Kepala Diskominfo 7. Kepala Bagian PBJ 8. Seluruh OPD
D	TIM EVALUASI 1. Ketua 2. Anggota	Inspektur 1. Irba wilayah I 2. Irban wilayah II 3. Irban Wilayah III 4. Irban Investigasi

Sumber: Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/xx/423.011/2023

Adapun tugas dari Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik yaitu:

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan road map reformasi birokrasi;
- b. Melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional yang dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat;
- c. Menyusun rencana aksi pada masing masing indicator Reformasi Birokrasi yang diampu;
- d. Melaksanakan Rencana aksi yang telah ditetapkan pada rencana aksi; dan
- e. Melaksanakan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan road map reformasi birokrasi 2023- 2023 yang telah ditetapkan.

Sedangkan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi bertugas yaitu:

- a. Melaksanakan pendampingan terhadap rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
- b. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
- c. Melaksanakan evaluasi pada rencana aksi yang telah dilaksanakan pada masing-masing tim;
- d. Melaporkan hasil evaluasi setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Tim STU/Kesekretariatan.

Kemudian Tim STU/Kesekretariatan yang bertugas:

- a. Memberikan arahan/ masukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
- b. Melaksanakan koordinasi pada lintas tim pada diktum kedua;
- c. Menerima laporan hasil evaluasi tim evaluasi Reformasi Birokrasi.

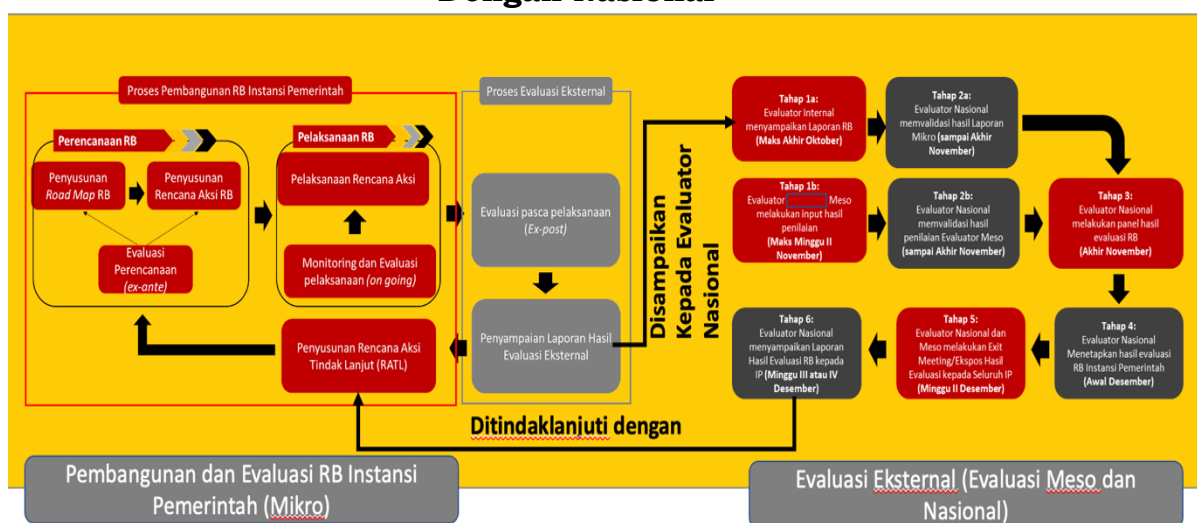
4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi RB dilakukan untuk :

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;
2. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal

Evaluasi berfokus pada Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Output dan Outcome). Monitoring dilakukan secara tribulan dan evaluasi akan dilakukan secara tahunan. Monitoring dilakukan melalui forum monev bersama dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Evaluasi dilakukan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspektorat yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Proses evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah juga harus terintegrasi dengan evaluasi dari Nasional. Adapun keterkaitan proses evaluasi di tingkat internal dengan Nasional disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Keterkaitan Proses Evaluasi Di Tingkat Internal Dengan Nasional



Sumber: Kementerian PANRB, 2023

BAB V

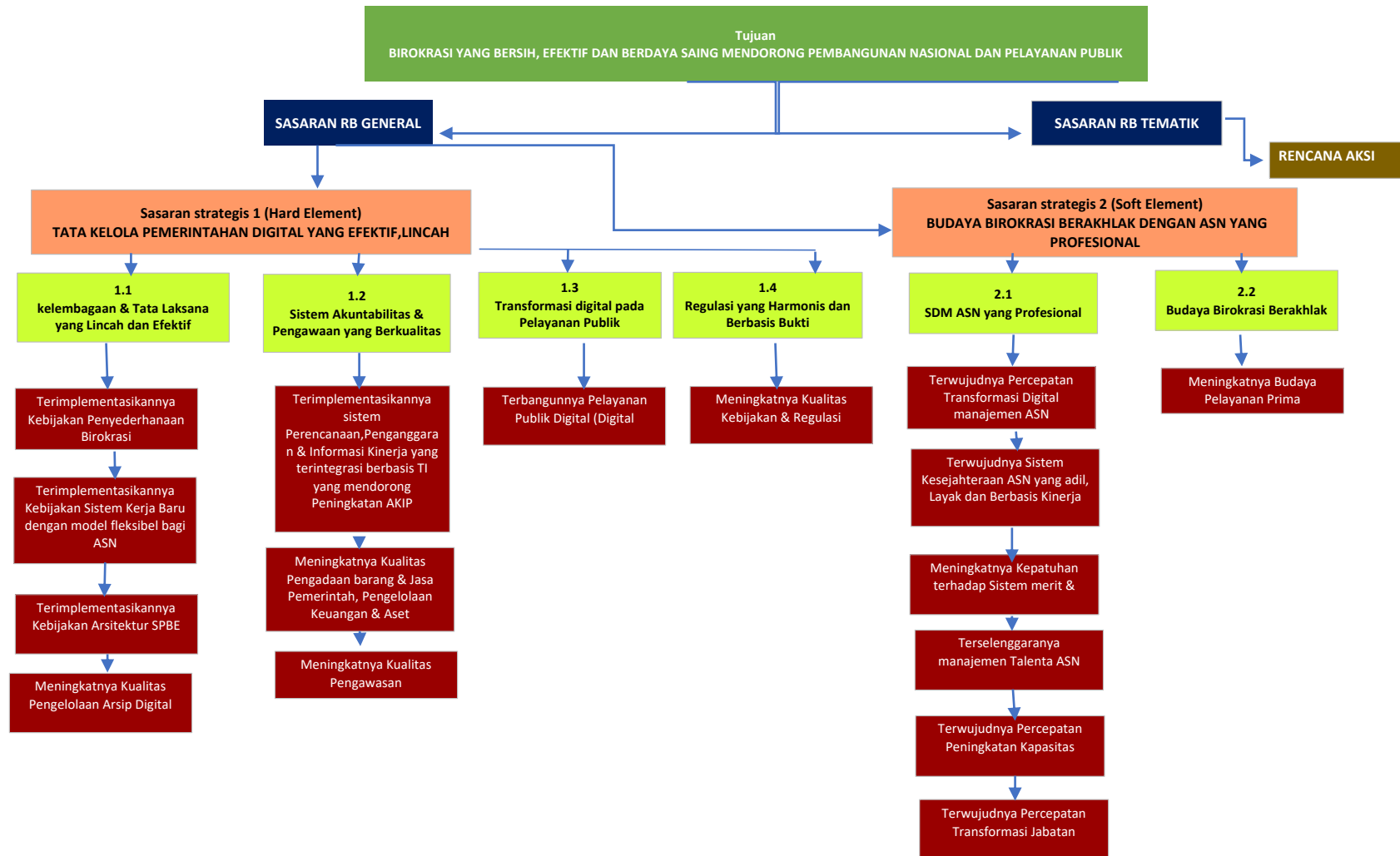
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Pasuruan juga menindaklanjuti melalui perubahan Road Map penajaman Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan 2021-2026. Harapannya melalui strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2026.

Lampiran 1

POHON KINERJA RB GENERAL



Lampiran 4

RENCANA AKSI RB GENERAL KOTA PASURUAN

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGRAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas bekerja Bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan fleksibilitas bekerja bagi Pegawai ASN	25%	a. Penyusunan Draft Perwali tentang sistem kerja bagi pegawai ASN	Jumlah	Jumlah rapat pembahasan draft perwali Sistem kerja baru	-	2	2	-	4	10.000.000	Bagor	Seluruh OPD
				b. Sosialisasi Perwali tentang sistem kerja baru bagi ASN	Jumlah	Jumlah rapat sosialisasi perwali Sistem kerja baru				1	1	8.000.000		
2	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	a. Sosialisasi Peningkatan Level Maturitas SPIP Terintegrasi telah dilaksanakan di akhir tahun 2022	Kegiatan	Kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	-	-	-	-	1	109.012.000	Inspektora t	Seluruh OPD
				b. Pelaksanaan SPIP										
				- Membentuk Satgas SPIP Pemerintah Daerah dan setiap OPD	SK	Surat Keputusan Walikota dan Surat Keputusan Kepala OPD Satgas SPIP	1	-	-	-	1			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				- Menetapkan rencana aksi peningkatan maturitas SPIP	Dokumen	Rencana Aksi Peningkatan Maturitas SPIP	1	-	-	-	1			
				- Pengumpulan dokumen identifikasi risiko dan RTP	Dokumen	Dokumen identifikasi risiko dan RTP OPD	-	1	-	-	1			
				- Monitoring Implementasi SPIP	Laporan	Laporan Monitoring Implementasi SPIP	-	-	1	-	1			
				c. Pelaporan SPIP										
				- Persiapan Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	Laporan	Laporan Persiapan Penilaian	-	-	-	1	1			
3	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0	c. Pembangunan Unit Kerja	Unit Kerja	Unit kerja sebagai Zona Integritas	-	-	3	-	3	21.585.3000	Inspektora t	Seluruh OPD
				d. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas	Laporan	Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan ZI	-	-	-	1	1			
				e. Pemenuhan Persyaratan hasil evaluasi ZI Kementrian PANRB	%	Prosentase capaian kepatuhan pelaporan LHKAN	100	100	-	-	100			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				f. Peningkatan Level Kapabilitas APIP		Kapabilitas APIP mencapai Level 3								
				- Pemenuhan dokumen pada 6 Elemen	%		50	50	-	-	100			
				- Koordinasi dengan BPKP untuk evaluasi atas pemenuhan elemen	%			100			100			
				- Menindaklanjuti Hasil Koordinasi atas kekurangan dokumen pemenuhan dan persyaratan untuk peningkatan level Kapabilitas APIP	%				100		100			
				- Persiapan pengajuan penilaian Kapabilitas APIP	%					100	100			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
4	Pelaksanaan Arsitektur SPBE	Indeks SPBE	2,81	Reviu pelaksanaan arsitektur SPBE dan Penyusunan peta rencana Arsitektur SPBE	%	Persentase tersusunnya dokumen reviu arsitektur SPBE dan Peta Rencana Arsitektur SPBE	-	20	80	-	100	102.700.000	Diskominf o	Seluruh OPD
						penyusunan raperwal arsitektur SPBE				1	1			
						Monitorin dan evluasi kebijakan SPBE				1	1			
5	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100	Pelaksanaan Monev SP4N Lapor 2 kali dalam setahun	%	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	3.200.000	Diskominf o	Seluruh OPD
						Penintregasian sistem lapor pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang berbasis IT				1	1			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	a. melaksanakan pendampingan kepada seluruh UPP secara berkala terhadap peningkatan layanan kepada masyarakat melalui tertib standar layanan dan fokus pada indikator pengungkit	OK	Jumlah rapat pendampingan indikator pelayanan publik bagi UPP	2	2	2	2	8	73.920.000		
				b. menyiapkan platform penilaian SKM berbasis gadget yang mudah di gunakan guna menghitung cepat hasil survey layanan	%	Persentase UPP dengan SKM minimal baik	-	50%	-	100%	100%	3.850.000	Bagor	Seluruh OPD
				c. Mengadakan Kompetisi Inovasi Publik (KOLABIK) untuk peningkatan Layanan Publik	Jumlah	Jumlah UPP yang mengikuti kompetisi	-	-	-	100%	100%	100.000.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
		Indeks Pelayanan Publik	4,2	a. melaksanakan pendampingan secara intens bagi OPD yang dinilai Indeks Pelayanan Publiknya baik oleh menpan maupun maupun Ombudsman	OK	Jumlah rapat pendampingan indikator pelayanan publik bagi UPP	3	3	3	3	12	46.200.000	Bagor	Seluruh OPD
				b. Melaksanakan Penilaian Mandiri untuk seluruh UPP sebagai upaya persiapan PEKPPP	%	Persentase UPP dengan Kepatuhan Pelayanan Publik minimal Baik	-	100%	-	-	100%	4.800.000		
7	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi	- 100%	Menyusun draf peraturan kepala daerah tentang sistem kerja	dok	jumlah kebijakan sistem kerja	-	50%	-	75%	100%	11.500.000	Bagor	Seluruh OPD
				a. Persiapan Survei			-	-	-	-	-	21.585.300		
8	Penguatan Upaya	Survei Penilaian	7,76	- Penyampaian kepada KPK komitmen	Orang	Penunjukan PIC Pemerintah	-	4	-	-	4		Inspektora t	Seluruh OPD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
	Pencegahan Korupsi	Integritas (SPI)		instansi sebagai peserta SPI Tahun 2023		Daerah Kota Pasuruan						21.585.300		
				- Penyampaian Matriks Tindak Lanjut	Dokumen	Matriks rencana tindak lanjut hasil SPI Tahun 2022	-	1	-	-	1			
				- Sosialisasi SPI 2023	Kegiatan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi atas SPI 2023	-	1	-	-	1			
				b. Pengumpulan Data dan Populasi										
				- Persiapan pelaksanaan dan pengumpulan data populasi (pegawai, pengguna layanan, eksper)	Dokumen	Data Populasi Responden	-	3	-	-	3			
9	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	50	Pengumpulan data dukung	dok	Data dukung kebijakan yang dikumpulkan	-	-	-	4	4	37.000.000	Bakum	Seluruh OPD
				Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	keg	Koordinasi yang akan dilaksanakan	-	-	-	1	1			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				Melaksanakan rapat dengan Perangkat Daerah terkait	rapat	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	-	-	-	5	5			
				Pengunggahan data dukung	data	Jumlah data dukung yang diunggah	-	-	-	4	4			
10	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	B	a. melaksanakan Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Jumlah rapat Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada	20	20	20	20	80	15.000.000	Bakum	Seluruh OPD
				b. melaksanakan pengembangan kompetensi, keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan		Jumlah bimbingan teknis dan pelatihan yang diikuti	1	1	1	-	3			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				teknis, pelatihan.										
				c. melaksanakan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah	Dokumen	tingkat ketercapaian penyusunan Raperda sesuai dengan perencanaan	2	-	-	-	2			
				d. melaksanakan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dalam rangka reregulasi dan deregulasi di tingkat daerah	Dokumen	Jumlah produk hukum daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	4	-	-	-	4			
				e. menindaklanjuti hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah	Dokumen	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah	2	-	-	-	2			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				f. terbangunnya JDIH yang terintegrasi dengan portal JDIHN		Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	1	1	1	1	4			
11	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	BB	Pengawasan Kearsipan Internal terhadap 33 Unit Kearsipan;	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	-	-	-	80	80		Disperpus arsip	Seluruh OPD
				1. Penerapan Aplikasi SRIKANDI terhadap 33 Unit Kearsipan;	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang menerapkan arsip elektronik		20	20	40	80%			
				2. Alih media arsip sesuai prosedur pada LKD				20	20	40%	80%			
				penyusunan kebijakan arsip digital	DOK	kebijakan arsip digital yang tersusun			1		1			
				monitoring kebijakan arsip digital	KEG	penerapan kebijakan arsip digital oleh PD				1	1			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	60	a.Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yaitu dengan cara:	Paket	- Jumlah paket selesai yang dicatatkan melalui SPSE - Jumlah transaksi melalui toko daring	0%	5%	25%	70%	100%	35.000.000	BLP	Seluruh OPD
				1. mendorong penyelesaian paket epurchasing (Katalog elektronik)										
				2. Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan epurchasing melalui Toko Daring;										
				3. Mencatatkan nilai realisasi pengadaan non transaksional/ manual.										

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				b. Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ: '1. Komitmen pemenuhan 60% Fungsional PBJ melalui mekanisme perpindahan jabatan/Uji Kompetensi; 2. Mengikutsertakan Sertifikasi Level-1 bagi pegawai.	Orang	Jumlah Personel Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terpenuhi sesuai formasi yang dibutuhkan.	1	2	1	1	5			
				c. Meningkatkan Kematangan UKPBJ:	Variabel	Tercapainya variabel kapabilitas UKPBJ level proaktif	3	1	2	3	9			
				1. Mengikuti program Bimtek peningkatan Kapabilitas UKPBJ; 2. Meningkatkan Standar LPSE; 3. Memenuhi seluruh										

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				variabel tingkat kematangan UKPBJ; 4. Membentuk Tim Pengelola Kapabilitas UKPBJ.										
13	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	70	Membangun SDM ASN BerAKHLAK : - BERorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Haermonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif Sosialisasi tentang Perilaku Kerja BerAkhlak kepada seluruh ASN	%	Prosentase ASN yang mengikuti Sosialisasi Prilaku Kerja ASN BerAKHLAK	-	95	-	-	95	9.900.000	BKD	Seluruh OPD
					ok	workshop peningkatan pendampingan agen perubahan				41	41	75.000.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
			16	Kompetensi ASN dengan cara memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti Diklat , Seminar maupun Workshop (lewat ASN Belajar BKN)	Skor	Kwalifikasi Pendidikan ASN Meningkat	-	-	-	16	16	20.000.000		
					ok	pelaksanaan diklat khusus pejabat fungsional hasil penyetaran jabatan				10	10	50.000.000		
			15	Kwalifikasi Pendidikan Memberikan kemudahan dalam pengurusan Ijin Belajar dan Tugas Belajar,	Skor	Kompetensi ASN Meningkat	-	-	-	15	15	10.000.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
		Employeeer Branding*	73	a. Penguatan core value ASN Berakhlak melalui Workshop Aktivasi Budaya Berakhlak & Penandatanganan Komitmen Bersama	%	Persentase ASN yang memahami Corevalue Berakhlak	-	100%	-	-	100%	21.750.000	Bagor	Seluruh OPD
				b. Mengadakan LCC (lomba cerdas cermat) ASN berakhlak sebagai upaya menuju World Class Beureaucracy	%	Persentase ASN yang mengimplementasikan Corevalue Berakhlak	-	100%	-	-	100%	65.000.000		
14	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	B	peningkatan kinerja perangkat daerah lintas sektoral	PD	pendampingan perangkat daerah	-	-	-	2	2	23.000.000	BPS	Seluruh OPD
						penilaian mandiri oleh daerah				2	2			
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Melakukan pendampingan kepada PPK OPD dalam menyusun Laporan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	110	-	-	-	110	277.655.800	BPKA	Seluruh OPD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				Keuangan OPD, meliputi :		Kabupaten/Kota								
				a. Penyusunan kertas kerja laporan keuangan	dok	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	4	417.787.000		
				b. Memverifikasi dokumen/data pendukung masing-masing akun pada laporan keuangan	pd		33				33			
				c. Melakukan pendataan ualng terhadap aset BMD	pd		33				33			
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75%	Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait	%	Temuan yang sudah ditindaklanjuti	-	-	100	-	100%	33.284.220	Inspektora t	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA		
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA	
16	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	50%	Mengimplemen- tasikan Perwali no. 65 tahun 2021, tentang Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kota	Dokumen	Tersusunya dokumen manajenen talenta	-	-	127	-	127	90.000.000	BKD	Seluruh OPD	
				PasuruanMeny usun Manajemen Talenta yang bekerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2023	Dokumen	kebijakan pentaan jabatan				1	1				
				Dokumen	monitoring penataan jabatan				1	1					
17	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	280	Meningkatkan capaian Indikator penilaian sistem merit di tahun 2023 (capaian tahun 2022 : 256,5 dari total nilai 400 atau 64% kategori III BAIK)	Skor	Nilai SISTEM MERIT Kota Pasuruan	-	-	-	270	270		BKD	Seluruh OPD	

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				Monev Implementasi peningkatan penilaian sistem merit	Dokumen	Tersusunnya dokumen monev peningkatan penilaian sistem merit	-	-	-	1	1	50.000.000		
					ok	Pembentukan karakter ASN dengan tim building peningkatan Indeks Sistem Merit	-				50	100.000.000		
18	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	-	Berkoordinasi Dengan Kementrian Panrb	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat	0	0	1		1	150.000.000	DPMPTSP	Seluruh OPD
				Berkoordinasi Dengan Dinas Kominfo	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi pemerintah provinsi			2		2			

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
19	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	75	Sosialisasi penilaian Kinerja ASN pemerintah kota Pasuruan (Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara)	Peserta	Jumlah peserta Sosialisasi	150	-	-	-	150	118.296.000	BKD	Seluruh OPD
			100	Pengembangan Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja (SIJAJA) untuk penambahan Fitur Perilaku Kerja BerAkhlak dan umpan Balik Berkelanjutan melalui penilaian Tri Bulanan (Mengimplementasikan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai	%	Integrasi Sistem Kinerja Pegawai	-	-	-	100	100	-		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				Aparatur Sipil Negara) koordinasi KOMINFO dan Bagian Organisasi										
			1	Monev Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	Dokumen	Tersusunnya dokumen monev Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	-	-	-	1	1	50.000.000		
20	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	1. Melakukan koordinasi dengan Bappenas/pihak terkait untuk mengetahui pengukuran indeks perencanaan pembangunan	ok	jumlah koordinasi	-	-	-	-	-	55.000.000	Bappelitbangda	Seluruh OPD

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pencapaian target indeks perencanaan pembangunan	ok	jumlah rapat koordinasi								
				3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	ok	PD yang di monev								
				4. Mengikuti penilaian penghargaan pembangunan daerah (PPD)	ok	masuk dalam penilaian tingkat nasional								
		Nilai SAKIP	BB	a. Penguatan dan penyempurnaan implementasi SAKIP melalui SI-JAJA (Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja) ASN yang terintegrasi	%	Persentase Kinerja ASN dengan predikat sangat baik	25%	50%	75%	100%	100%	4.000.000	BAGOR	Seluruh OPD
				b. Melaksanakan Desk fokus pada indikator	Jumlah	Jumlah desk SAKIP OPD	-	2	3	-	3	6.000.000		

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				SAKIP bagi seluruh OPD										
				c. Pemenuhan Tindaklanjutan atas LHE Sakip 2022 dengan melakukan perbaikan sebagaimana rekomendasi evaluator	%	Persentase Tindaklanjutan LHE	50%	100%	-	-	100%	6.000.000		
21	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	50%	Melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyetaraan/transformasi Jabatan struktural sebanyak 189 menjadi jabatan fungsional (Pelantikan 186 ASN menjadi jabatan fungsional)									BKD	Seluruh OPD
			64	a. Pelaksanaan Bimtek terkait Jabatan Fungsional	ASN	ASN yang mengikuti Bimtek terkait Jabatan	-	-	64	-	64	55.000.000		

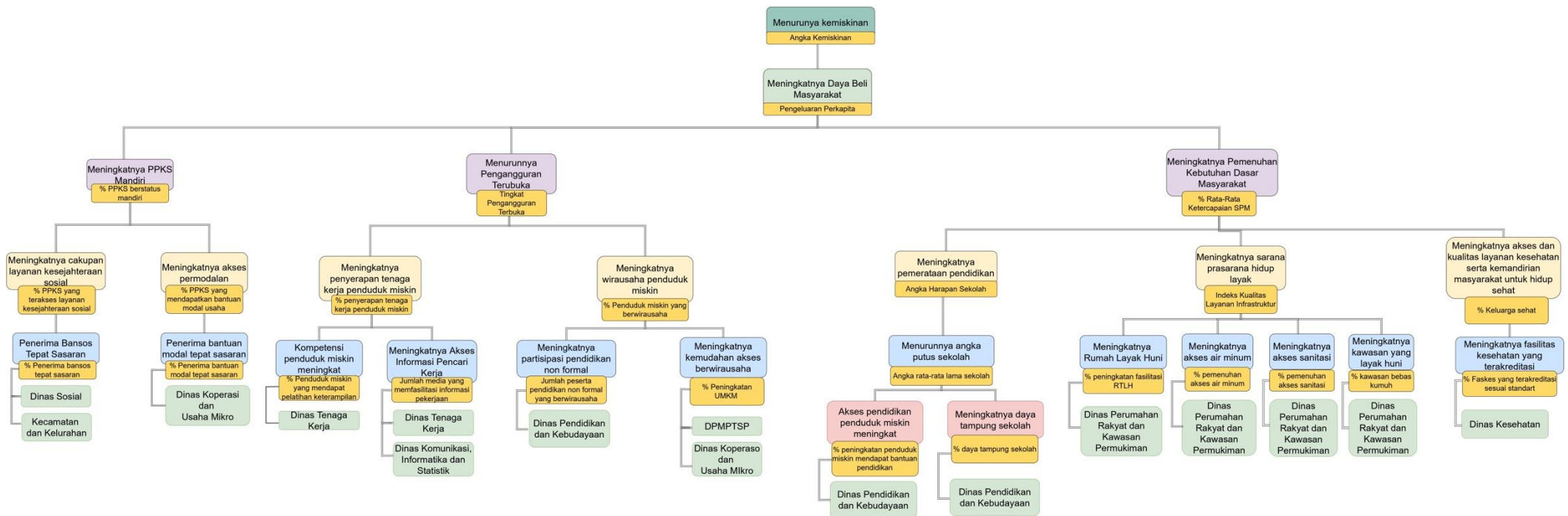
NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN (2023)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		KOORDINATOR	PELAKSANA
				Hasil Penyetaraan Jabatan		Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan								
				b. Sosialisasi PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	ASN	ASN yang mengikuti Sosialisasi PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	-	-	-	240	240	14.400.000		
				c. Penataan Pejabat Fungsional sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Syarat Jabatan	Kali	Pelaksanaan Penataan Pejabat Fungsional sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Syarat Jabatan	-	-	-	1	1	15.000.000		
				Monev Implementasi Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Dokumen	Tersusunnya dokumen monev Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	-	-	-	1	1	50.000.000		

Sumber: Kota Pasuruan 2023

Lampiran 3

POHON KINERJA RB TEMATIK KEMISKINAN

POHON KINERJA RB TEMATIK KEMISKINAN



Lampiran 4

RENCANA AKSI RB TEMATIK KEMISKINAN TAHUN 2023

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Masih banyak nya masyarakat miskin	Menurun nya jumlah masyarakat miskin	Angka Kemiskinan	5,65%	Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	KK	Data penduduk miskin yang diverifikasi dan divalidasi	13256	11068	11066	11065	46455	Proses verifikasi validasi KPM penerima bantuan atau calon penerima bantuan	232.275.000	Dinsos	Dinsos
				Pemberian Bantuan Sosial	KPM	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan Sosial	4706	4706	4706	4706	4706	Penyaluran bantuan sosial APBD 2.Sosialisasi pada masyarakat terkait DTKS dan Bansos	6.588.400.000	Dinsos	Dinsos
				Pemberdayaan PSKS	PSKS	Persentase PSKS yang diberdayakan	85%	85%	85%	85%	85%	Pembinaan rutin PSKS, BIMTEK dan Sudi tiru	657.018.800	Dinsos	Dinsos

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Meningkatkan akses air minum layak	Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan air minum layak			198	90	288	Terkait	1.622.779.600	DPRKP	DPRKP
				Pembangunan Jamban Sehat	Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan jamban sehat		128	569	405	1.102	Terkait	11.313.855.200	DPRKP	DPRKP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Renovasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin	Ruta	Jumlah Rumah tangga miskin dengan rumah layak huni		100	100	100	300	Terkait	5.250.000.000	DPRKP	DPRKP
				Penguatan kolaborasi antara dinas dengan kelurahan untuk memprioritaskan warga yang termasuk	orang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	40	70	145	175	175	Terkait secara langsung dengan masyarakat	1.239.005.000	Disnaker	Disnaker

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				duk kemiskinan ekstrim untuk menjadi peserta											
				Memberikan Bimtek kepada wirausaha baru terkait manajemen marketing (digitali	orang	Jumlah peserta konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil			25		25	Terkait secara langsung dengan masyarakat	22.380.900	Disnaker	Disnaker

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				sasi pemasaran produk)											

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Mmberikan penyuluhan kepada calon lulusan terkait persiapan memasuki dunia kerja	orang	Jumlah calon pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan kerja sama dengan BKK SMK		440			440	Terkait secara langsung dengan masyarakat	53.133.020	Disnaker	Disnaker

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Memberikan pekerjaan sementara kepada penganggur dan setengah penganggur	orang	Jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang dipekerjakan			108		108	Terkait secara langsung dengan masyarakat	274.888.300	Disnaker	Disnaker
				Peningkatan kolaborasi (kerjasama) dengan perusahaan agar memprioritaskan	orang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui Job Fair			300		300	Terkait secara langsung dengan masyarakat	24.459.000	Disnaker	Disnaker

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				an tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan											
				Rapat Koordinasi TKPKD	Kali	Jumlah Rapat Koordinasi TKPKD				1	1	Rapat Koordinasi	20.350.000	Bidang Sosbud pem	Bappeda

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan	Jumlah keluarga yang melaksanakan fasilitasi penanggulangan kemiskinan Tk. Kecamatan	4				4	Rapat Pokja Kemiskinan Kecamatan	24.000.000	Kasi Kelembagaan	Kecamatan se Kota Pasuruan

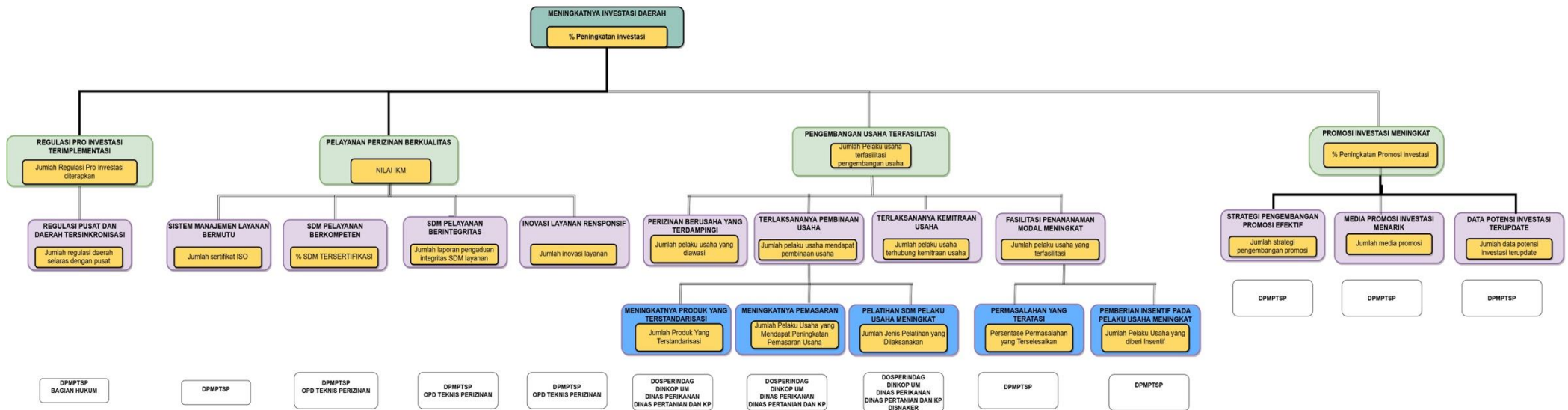
Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan fasilitasi penanggulangan kemiskinan Tk. Kelurahan	34	34			34	Rapat Pokja Kemiskinan Kelurahan dan Muskel	50.775.600	Kasi Kelembagaan	Kelurahan se Kota Pasuruan

Sumber: Kota Pasuruan, 2023

Lampiran 5

POHON KINERJA RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI

POHON KINERJA RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI



Lampiran 6

RENCANA AKSI RB TEMATIK PENINGKATAN INVESTASI 2023

N O	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	1.67%	MENGIMPLEMENTASIKAN REGULASI PRO INVESTASI PELAYANAN PERIZINAN (Perwali Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal)	dokumen	Jumlah regulasi pro investasi diterapkan	0	0	0	1	1 Dokumen Perwali Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Berusaha	Tanpa Anggaran	DPMPTSP, Bagian Hukum	DPMPTSP, Bagian Hukum
				MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN BERKUALITAS	Indeks	Nilai IKM	0	1	0	1	2 Nilai Indeks di Semester 1 dan 2	40,000,000	DPMPTSP	DPMPTSP
				MENINGKATKAN MUTU SISTEM MANAJEMEN LAYANAN	Sertifikat	Jumlah sertifikat ISO	0	0	0	1	1 Dokumen Penyusunan ISO	40,000,000	DPMPTSP	DPMPTSP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
				MENINGKATK AN INOVASI LAYANAN RENSPONSIF (SIAP BOSS, CIAMIK, JEMPOLAN)	Inovasi	Jumlah inovasi layanan	0	0	0	1	1 Inovasi Jempolan	Tanpa Anggara n	DPMPT SP	DPMPTSP
				PENGEMBANG AN USAHA TERFASILITAS I	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha terfasilit asi pengemb angan usaha	0	0	0	12 00	1200 Pelaku usaha terfasilitas i pengemba ngan usaha	3,278,04 7,720	DPMPT SP, DISPER INDAG, DINKO P, DISNAK ER	DPMPTSP, DISPERINDA G, DINKOP, DISNAKER
				PENDAMPING AN PERIZINAN BERUSAHA	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang di awasi	45	45	45	45	180 Pelaku Usaha Yang Diawasi	192,608, 960	DPMPT SP	DPMPTSP
				MELAKSANAK AN PEMBINAAN USAHA (Pembinaan Perizinan Berusaha terkait OSS dan LKPM)	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha mendapa tkan pembina an usaha	0	0	30 0	0	300 Pelaku Usaha	287,842, 620	DPMPT SP	DPMPTSP

N O	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUNAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
				MENINGKATKAN STANDARISASI PRODUK (Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi halal)	Produk	Jumlah Produk yang standarisasi	0	0	0	40	40 Usaha Mikro yang terfasilitasi halal	80,000,000	DINKOP	DINKOP
				MENINGKATKAN STANDARISASI PRODUK (Fasilitasi Kemasan dan Sertifikasi Halal)	Produk	Jumlah Produk yang standarisasi	0	0	0	14	14 IKM	75,582,800	DISPERINDAG	DISPERINDAG
				MENINGKATKAN PEMASARAN (Strategi Komunikasi Online Pemasaran Produk dan Jasa Koperasi, Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi)	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan peningkatan pemasaran usaha	0	0	0	30	30 Koperasi	35,000,000	DINKOP	DINKOP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
				MENINGKATK AN PEMASARAN (Pengembanga n Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi)	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapa t peningka tan pemasar an usaha	0	0	0	30	30 Koperasi	15,000,0 00	DINKO P	DINKOP
				MENINGKATK AN PEMASARAN (Pelatihan Pemasaran Jaringan Pemasaran Online dengan peserta dari usulan musrenbang sebanyak 66 UM, usulan pokkir sebanyak 1 Orang, Usaha Mikro Kota Pasuruan	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapa t peningka tan pemasar an usaha	0	0	0	80	80 Usaha Mikro	351,207, 455	DINKO P	DINKOP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
				sebanyak 13 UM)										
				MENINGKATK AN PEMASARAN (Pelatihan Digitalisasi Produk (Marketing Digital))	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapa t peningka tan pemasar an usaha	0	0	0	40	40 IKM	123,000, 000	DISPER INDAG	DISPERINDA G
				MENINGKATK AN KUALITAS SDM PELAKU USAHA	Pelatiha n	Jumlah Jenis Pelatiha n yang dilaksan akan	0	0	0	14	14 Pelatihan	2,310,41 4,845	DISNAK ER, DISPER INDAG, DINKO P	DISNAKER, DISPERINDA G, DINKOP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
						1. Pelatiha n Manajem en Pembiay aan dan Permoda lan dengan peserta dari usulan musrenb ang sebanya k 90 UM	0	0	0	90	90 usaha mikro	92,000,0 00	DINKO P	DINKOP
						2. Pelatiha n Motif Rajut Khas Kota Pasurua n dengan Peserta dari usulan musrenb ang	0	0	0	50	50 Usaha Mikro	95,000,0 00	DINKO P	DINKOP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
						sebanya k 45 UM, dan Usaha Mikro Kota Pasurua n sebanya k 5 UM								
						3. Jumlah Usaha Mikro yang mengiku ti Pelatiha n Kewiraus ahaan	0	0	0	40	40 Usaha mikro	170,000, 000	DINKO P	DINKOP
						4. Jumlah Usaha Mikro yang mengiku ti Pendamp ingan	0	0	0	50	50 Usaha Mikro		DINKO P	DINKOP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
						5. Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang mengiku ti Pelatiha n Kemasan	0	0	0	50	50 Usaha Mikro	351,207, 455	DINKO P	DINKOP
						6. Tata Boga, DKV, Membati k, Perawata n Kencanti kan Kulit, Pelatiha n administ rasi Akuntan si, Pelatiha n Bordir, Rias	0	0	0	16 0	160 orang	856,537, 500	DISNAK ER	DISNAKER

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
						Penganti n, Pemagan gan								
						7. Pembina an LPKS di Kota Pasurua n	0	0	0	12	12 lembaga	5,179,40 0	DISNAK ER	DISNAKER
						8. Pembina an Wira Usaha Baru	0	0	0	10 0	100 perusahaa n	22,381,5 90	DISNAK ER	DISNAKER
						9. Pembina an dan bimbinga n jabatan untuk pencari kerja	0	0	0	20 0	200 orang	30,991,6 00	DISNAK ER	DISNAKER
						10. Pelatiha n Desain Mebel	0	0	0	14	14 IKM	146,442, 500	DISPER INDAG	DISPERINDA G

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
						11. Pelatiha n Pembuat an Makana n Olahan (Tepung)	0	0	0	14	14 IKM	57,615,5 00	DISPER INDAG	DISPERINDA G
						12. Pendamp ingan 5R untuk IKM Logam	0	0	0	10	10 IKM	167,528, 200	DISPER INDAG	DISPERINDA G
						13. Pelatiha n Teknik Pelapisa n Bahan Dasar Logam	0	0	0	15	15 IKM	224,667, 100	DISPER INDAG	DISPERINDA G
						14. Pelatiha n Teknik Pengelas an	0	0	0	10	10 IKM	90,864,0 00	DISPER INDAG	DISPERINDA G

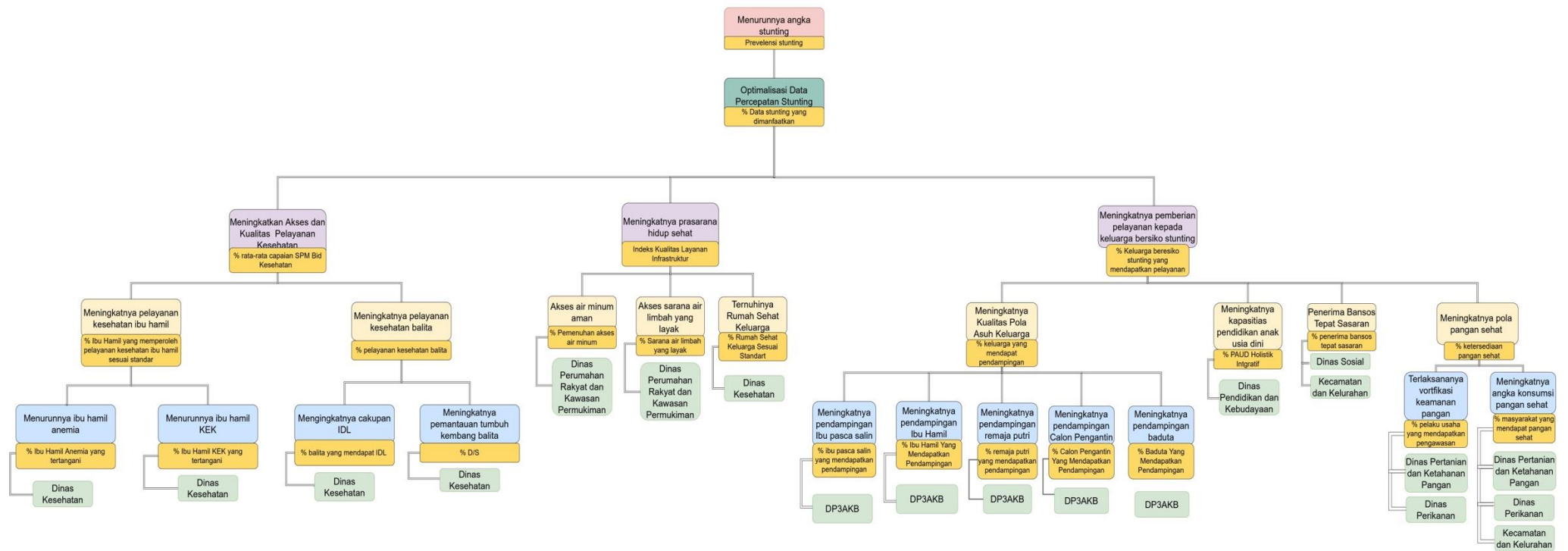
N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
				MELAKSANAK AN KEMITRAAN USAHA (Jumlah Usaha Mikro yang melakukan Jaringan Kemitraan)	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha terhubu ng kemitraa n usaha	0	0	0	30	30 Koperasi	35,000,0 00	DISPER INDAG DAN DINKO P	DISPERINDA G DAN DINKOP
				MELAKSANAK AN KEMITRAAN USAHA (Pengembanga n Jaringan Usaha Koperasi)	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha terhubu ng kemitraa n usaha	0	0	0	10	10 Koperasi	80,000,0 00	DINKO P	DINKOP
				PENYELESAIA N PERMASALAH AN USAHA	Persen	Prosent se permasal ahan yang terselesa ikan	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100%	22,834,4 00	DPMPT SP	DPMPTSP
				MENINGKATK AN PROMOSI INVESTASI	Persen	% Peningka tan Promosi investasi	0	0	1	1	2 Pameran MTQ dan Apeksi	86,725,4 40	DPMPT SP	DPMPTSP

N O	KEGIATA N UTAMA	INDIKATO R KU	TARGE T TAHUN AN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN (Rp)	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUA N	INDIKAT OR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOOR DINAT OR	PELAKSANA
				MENINGKATK AN STRATEGI PENGEMBANG AN PROMOSI (Matchmaking, Forum Bisnis, Temu Usaha)	Strategi	Jumlah strategi pengemb angan promosi	0	0	1	0	1 (Bussines Matching PASIA oleh SME Support Japan)	Tanpa Anggara n	DPMPT SP, DINKO P	DPMPTSP, DINKOP
				MENINGKATK AN MEDIA PROMOSI INVESTASI (Pameran, Media Online, IPRO)	Media	Jumlah media promosi	0	0	1	1	2 Pameran MTQ dan Apeksi	86,725,4 40	DPMPT SP	DPMPTSP

Lampiran 7

POHON KINERJA RB TEMATIK PENURUNAN STUNTING

POHON KINERJA RB TEMATIK STUNTING



Lampiran 8

RENCANA AKSI RB TEMATIK PENURUNAN STUNTING 2023

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/S takeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
Masih tingginya kasus stunting	Menu runkan kasus stunting	Angka Prevelensi Stunting	16%	Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat	%	Prevalensi Balita Stunting	16%	16%	16%	16%	16%	1. Pengadaan PMT (susu) Balita Stunting 2. Pengadaan PMT Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) 3. Pengadaan PMT Pemulihan Anak Gizi Buruk 4. Pengadaan Alat Antropometri	1.483.200.000 80.000.000 80.000.000 2.460.328.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
												Kit (DAK Fisik) 5. Pengadaan PMT Balita Stunting di 8 Puskesmas	494.400.000		
				Edukasi dan konseling pemberian makan bayi dan anak (PMBA)	Ibu	Ibu menyusui yang mendapatkan edukasi dan konseling PMBA	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	Terkait secara langsung dengan masyarakat		Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Pemberian tablet darah kepada remaja putri	%	Remaja Putri yang mendapat tablet tambah darah	56 %	56 %	56 %	56 %	56%	1. Pelaksanaan Aksi Bergizi (BOK)	24.062.200	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	%	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	80 %	80 %	80 %	80 %	80%	1. Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK dan atau Anemia Berat 2. Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK (BOK) di 8 puskesmas	13.500.000 549.540.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Pemberian suplemen zat besi dan asam folat	Bumil	Ibu hamil yang mendapatkan suplemen zat besi dan asam folat	723	723	723	723	2.892	Terkait secara langsung dengan masyarakat		Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI)	Orang	Anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	Terkait secara langsung dengan masyarakat		Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
						mping ASI									
				Pendampingan dan pemberian makanan tambahan untuk balita gizi kurang;	%	Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	85 %	85 %	85 %	85 %	85%	Pengadaan PMT Balita Gizi Kurang (BOK) di 8 puskesmas	1.493.910.000	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Pencegahan penyakit pada bayi	%	Persentase bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	24,9%	24,9%	24,9%	24,9%	99,6%	Gerilya (Gerakan Imunisasi Lengkap dengan Penyulaman), Advokasi Lintas Sektor untuk Peningkatan Capaian UCI, Bulan Merdeka (Melengkapi Sasaran Dengan Imunisasi Lengkap)	130.000.000	Bidang P2 Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Penyediaan vitamin A untuk balita	%	Persentase balita mendapat vitamin A	89 %	0%	89 %	0%	89% (pemberian vitamin A di bulan februari dan agustus saja)	Terkait secara langsung dengan masyarakat		Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Pemberian KIE tentang kesehatan reproduksi, nutrisi	Orang	Jumlah Calon pengantin yang mendapat	340	340	340	340	1.360	Terkait secara langsung dengan masyarakat	96.000.000	DP3AKB	DP3AKB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia		informasi dan edukasi tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia									

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga	Orang	Jumlah Keluaran Anak Stunting yang mendapatkan pendampingan berkaitan dengan pola asuh dan gizi		2.060			2.060	Terkait secara langsung dengan masyarakat	381.795.280	DP3AKB	DP3AKB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga Baduta	Keluarga	Jumlah Keluarga Ibu Hamil dan yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK		922			922	Terkait secara langsung dengan masyarakat	184.800.000	DP3AKB	DP3AKB
				Penguatan Peran PIK R dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi	Kelompok PIK-R	Jumlah Keluarga Remaja Putri yang mendapatkan		155			155	Terkait secara langsung dengan masyarakat	20.400.000	DP3AKB	DP3AKB

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu		informasi dan edukasi tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sehat dan bahagia									

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Pembangunan Jamban Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang berkeses jamban sehat		128	569	405	1.102	Terkait	11.313.855.200	DPRKP	DPRKP
				Meningkatkan akses air minum layak	Rumah Tangga	Jumlah Rumah tangga yang terlayani akses air bersih			198	90	288	Terkait	1.622.779.600	DPRKP	DPRKP

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kelompok	Jumlah kelompok yang tersasar keg. KRPL		65			65	Terkait	191.379.000	Disperta & KP	Disperta & KP
				Pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan	Orang	Pemberian PMT Hasil Olahan Ikan kepada Anak Stunting		2.060	2.060		2.060	Terkait	618.000.000	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Bantuan sosial pangan bagi KPM	KPM	Meningkatkan asupan gizi dan nutrisi kepada KPM	7.629	7.629	7.629	7.629	7.629	Terkait	1.369.654.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
				Family Development Sesion (FDS) pada PKH		KPM PKH mampu memahami pencegahan stunting					7.629	Terkait	1.369.654.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Koordinasi percepatan penurunan stunting	Kali	Jumlah Rapat Koordinasi percepatan penurunan stunting			4	4	8	Rapat Koordinasi	9.600.000	Bidang Sosbud pem	Bappeda
				Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Orang	Jumlah Kader Pembangunan Manusia yang dibina			34	34	34	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	46.600.000	Bidang Sosbud pem	Bappeda

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Orang	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti Sosialisasi Stunting		250			250	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	28.494.000	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Dinas P dan K
				Pembinaan Lembaga PAUD	Orang	Jumlah Peserta Implementasi Pembelajaran PAUD Holistik			230		230	Jumlah Peserta Implementasi Pembelajaran PAUD Holistik Integratif	50.000.000	Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat	Dinas P dan K

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
						Integratif									
				Melakukan integrasi data stunting	%	Persentase Data Stunting yang Terintegrasi	15	30	55	70	70	Terkait	308.144.260	Bidang Statistik	Diskominfo
				Mempublikasikan data dan informasi stunting	Informasi	Jumlah Informasi Stunting yang	6	6	6	6	24	Terkait		Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo

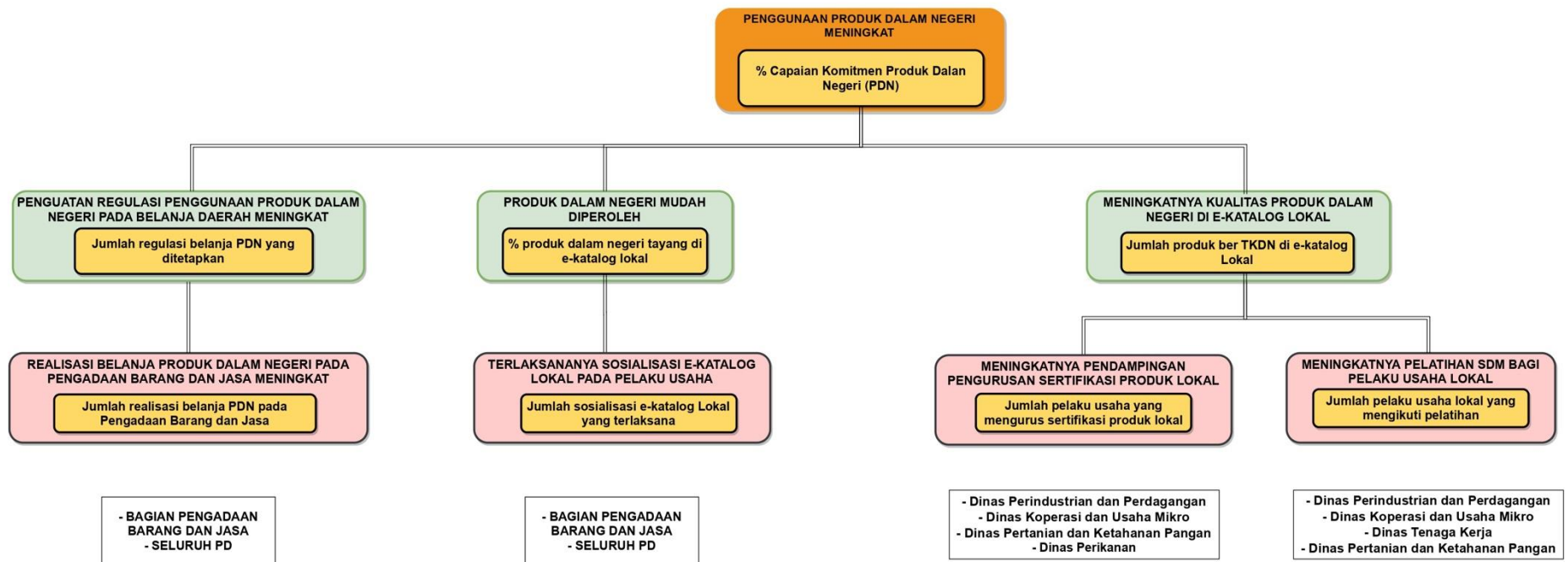
Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi * (Terkait atau Tidak Terkait Secara Langsung Dengan Masyarakat/Stakeholder Utama)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
				di media massa		Dipublikasi									

Sumber: Kota Pasuruan 2023

Lampiran 9

POHON KINERJA RB TEMATIK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

POHON KINERJA RB TEMATIK PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)



Lampiran 10

RENCANA AKSI RB TEMATIK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pemanfaatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Komitmen PDN	90%	Menayangkan produk dalam negeri dalam e-katalog lokal	Produk	Jumlah produk dalam negeri tayang di e-katalog lokal	17500	20000	23000	27500	27500	0	Bagian PBJ	Bagian PBJ
				Regulasi penggunaan PDN pada belanja daerah	dokumen	Jumlah regulasi belanja PDN yang ditetapkan	1	-	-		1	0	Bagian PBJ	Bagian PBJ
				Peningkatan kualitas produk di e-katalog lokal	produk	Jumlah produk ber TKDN di e-	1500	1750	2000	2250	2250	0	Disperindag	Disperindag, inspektorat, bag perekonomian, bag pembanguna

N O	KEGIA TAN UTAM A	INDIK ATOR KU	TAR GET TAH UNA N 2023	RENCA NA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SAT UAN	INDIK ATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINAT OR	PELAKSANA
						katalog g lokal								n, bpbj, dinkopukm
				Pendam pingan pengur usan sertifika si produk lokal	Serti fikat	Jumla h pelaku usaha yang mengu rus sertifi kasi produ k lokal							Disperindag, Dinkop, Disperta, Disperik	Disperindag, Dinkop, Disperta, Disperik
										50	50 sertifikat PIRT	Rp 26.460.23 0	Dinkop UM	Dinkop UM
										24	24 sertifikat TKDN	Rp623.59 4.400	Disperindag	Disperindag

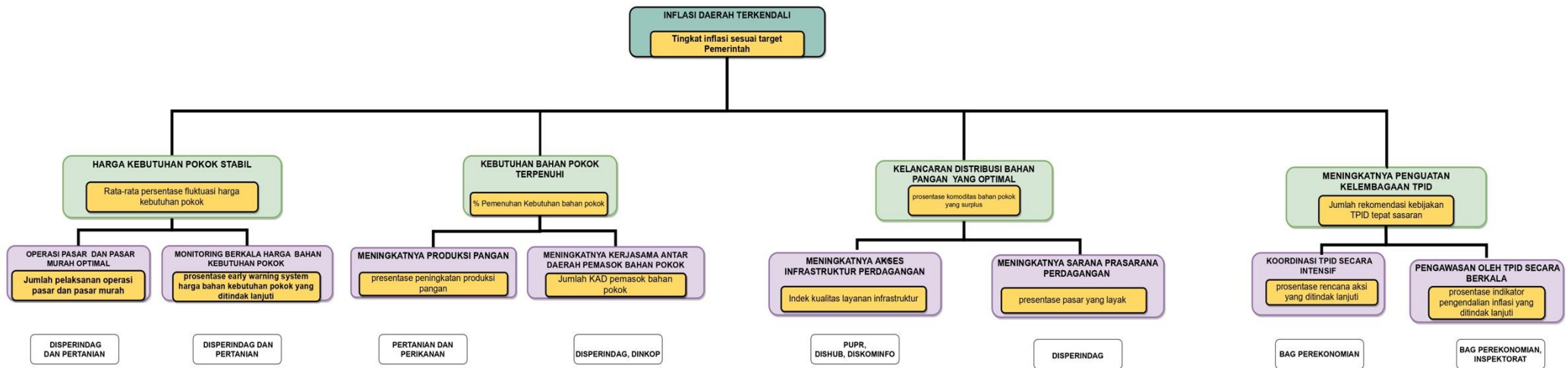
N O	KEGIA TAN UTAM A	INDIK ATOR KU	TAR GET TAH UNA N 2023	RENCA NA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGAR AN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SAT UAN	INDIK ATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINAT OR	PELAKSANA
										50	50 sertifikat PIRT, Ijin Usaha, Halal	0	Disperik	Disperik
				Pelatiha n SDM bagi pelaku usaha lokal	pese rta	Jumla h pelaku usaha lokal yang mengi kuti pelati han pening katan SDM							Disperindag, Dinkop, Disnaker, Disperta	Disperindag, Dinkop, Disnaker, Disperta
							24	52	10 9	50	235 Peserta	Rp1.403. 649.100	Disperindag	Disperindag
										28 5	285 peserta	Rp 405.000.0 00	Dinkop UM	Dinkop UM

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
										250	250 Peserta	Rp 240.000.000	Disperta	Disperta
				Sosialisasi e-katalog lokal pada pelaku usaha	Inovasi	Jumlah sosialisasi e-katalog lokal yang terlaksana	0	2	1	1	100 peserta	35000000	Bagian PBJ, Seluruh PD	Bagian PBJ, Seluruh PD
										1800	1800 peserta	Rp 316.915.800	Dinkop UM	Dimkop UM
				Peningkatan Realisasi belanja PDN pada pengadaan Barjas	Rupiah	Realisasi belanja PDN pada barjas	50 M	10 OM	25 OM	34 OM	Rp 340.000.000.000,-	Rp 340.000.000.000,-	Bagian PBJ, BPKAD, INSPEKTORAT, BAG.ADM PEMBANGUNAN	Bagian PBJ, BPKAD, INSPEKTORAT, BAG.ADM PEMBANGUNAN, OPD Lainnya

Lampiran 11

POHON KINERJA RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI

POHON KINERJA RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI



Lampiran 12

RENCANA AKSI RB TEMATIK PENGENDALIAN INFLASI 2023

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET TAHUN (2023-2024)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Inflasi Daerah terkendali	Tingkat Inflasi sesuai target pemerintah	2 - 4 %	PENGUATAN KELEMBAGAAN TPID	dokumen	Jumlah rekomendasi kebijakan TPID tepat sasaran	2	0	0	0	2	33999760	Bag Perekonomian	Bag Perekonomian
				PENINGKATAN KOORDINASI TPID SECARA INTENSIF	%	prosentase rencana aksi yang ditindak lanjuti	0	70	70	70	70	0	Bag Perekonomian	Bag Perekonomian
				PENGAWASAN OLEH TPID SECARA BERKALA MENINGKAT	%	prosentase indikator pengendalian inflasi yang ditindak lanjuti	0	70	70	70	70	0	Bag Perekonomian	Bag Perekonomian

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUN (2023-2024)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
				PELAKSANAAN PUBLIKASI INFORMASI KEGIATAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGENDALIAN INFLASI	Informasi	Jumlah informasi penanganan pengendalian inflasi	3	3	3	3	12	0	DISKOMIN FOTIK	DISKOMIN FOTIK
				KELANCARAN DISTRIBUSI BAHAN PANGAN	%	persentase komoditas bahan pokok yang surplus	80	80	80	80	80	0	DISPERIN DAG	DISPERIN DAG
				PENINGKATAN AKSES INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN	Indeks	Indeks kualitas layanan infrastruktur				3,6	3,6	76000000	DINAS PUPR	DINAS PUPR, DISHUB

N O	KEGIA TAN UTAM A	INDIKA TOR KU	TARG ET TAHU NAN (2023- 2024)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOT AL	JUMLAH ANGGAR AN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATU AN	INDIKA TOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDIN ATOR	PELAKSA NA
				PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDAGANGAN	%	presentase pasar yang layak	0	11,11	22,22	0	33,33	89562067600	DISPERIN DAG	DISPERIN DAG
				PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN POKOK	%	% Pemenuhan Kebutuhan bahan pokok	104%	104%	104%	104%	104%	0	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
				PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN	%	presentase peningkatan produksi pangan	0	0	0	2	2%	1.495.257.680	Dinas Pertanian/ Dinas perikanan	Dinas Pertanian/ Dinas perikanan
					%	Presentase peningkatan produksi pertanian	0	0	0	0	0%	0	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KU	TARGET TAHUN (2023-2024)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOTAL	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDINATOR	PELAKSANA
					%	Persentase peningkatan produksi perikanan	0	0	0	2%	2%	1495257680	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
				PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PEMASOK BAHAN POKOK	dokumen	Jumlah KAD pemasok bahan pokok		1	1		2	0	Disperindag	Disperindag
				TERJAGANYA STABILITAS HARGA KEBUTUHAN POKOK	%	Rata-rata persentase fluktuasi harga kebutuhan pokok	10%	10%	10%	10%	10%	118.010.320	Disperindag	Disperindag

N O	KEGIA TAN UTAM A	INDIKA TOR KU	TARG ET TAHU NAN (2023- 2024)	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				TOT AL	JUMLAH ANGGAR AN	UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
					SATU AN	INDIKA TOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			KOORDIN ATOR	PELAKSA NA
				PELAKSAN AAN OPERASI PASAR	kali	Jumlah pelaksa naan operasi pasar	0	9	0	0	9 Kali	623.000. 000	Disperinda g	Disperinda g
				PELAKSAN AAN PASAR MURAH	kali	Jumlah pelaksa naan pasar murah	0	1	0	0	1 Kali	273.959. 080	Disperinda g	Disperinda g
				MONITORI NG HARGA BAHAN KEBUTUH AN POKOK	Kali	Jumlah pelaksa naan monitori ng harga bahan kebutuh an pokok	90	90	90	90	360 kali	118.010. 320	Disperinda g	Disperinda g



SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

BAGIAN ORGANISASI

Jalan Pahlawan No. 28 Telp. (0343) 426604

Website : www.pasuruankota.go.id Email : bagianorganisasipaskot@gmail.com

PASURUAN

Kepada :

Yth. Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Di

PASURUAN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 065/ 338 /423.033/2023

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Walikota Pasuruan tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023-2024	3 (Tiga) Berkas	1. Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan ROAD MAP Reformasi Birokrasi
2	Keputusan Walikota Pasuruan tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.		2. Untuk Memantau dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan
3	Keputusan Walikota Pasuruan tentang Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi		

Demikian disampaikan dengan hormat sebagai bahan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pasuruan, 28 April 2023
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

28/4/23

mta

2

CINDY TRI SIWIYANTI, SH, M.Hum.

NIP. 19800620 200312 2 011



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 28 Telp. 0343-426604/426919 Fax. 0343-425697
PASURUAN 67126



Pasuruan, 4 Mei 2023

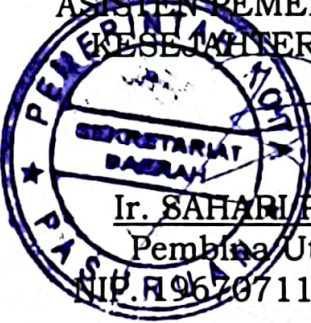
Nomor : 188/ **332** /423.011/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Permohonan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Walikota Pasuruan SURABAYA

Disampaikan dengan hormat bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami kirimkan rancangan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan mohon untuk mendapatkan fasilitasi lebih lanjut.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. WALIKOTA PASURUAN
SEKRETARIS DAERAH,
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT


Ir. SAHARI PUTRO, MM.
Pembinas Utama Muda
NIP. 19620711 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Bpk. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)

Hukum Kota Pasuruan <hukumpaskot@gmail.com>
Kepada: birohukumjatim@yahoo.com

5 Mei 2023 pukul 14.11

 Matrik Perwa 00-2023 Road Map RB 2023-2024.doc
83K

 2023-Permenpan RB nomor 3 Tahun 2023.pdf
1311K

 **Perwa 00-2023 Road Map RB 2023-2024.doc**
2969K



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung capaian Reformasi Birokrasi Kota Pasuruan yang inline dengan capaian sasaran pembangunan nasional perlu dilakukan penajaman dan penyelarasan kondisi yang diperlukan terhadap indikator tujuan, sasaran, kegiatan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi terhadap roadmap reformasi Birokrasi.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Walikota Nomor Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pasuruan 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Tujuan penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik;
- (2) Sasaran penajaman Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. sasaran Reformasi Birokrasi General mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta budaya birokrasi berAkhlak dengan ASN yang professional;
 - b. sasaran Reformasi Birokrasi Tematik yakni untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan hasil pada kemiskinan, inflasi, investasi, digitalisasi (stunting) dan penggunaan produk dalam negeri;
- (3) Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dibentuk Tim atau Unit pengelola Reformasi Birokrasi Internal, yang diatur tersendiri melalui Keputusan Walikota.

2. Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Pada pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jangka waktu Road Map Reformasi Birokrasi selama 2 (dua) tahun yaitu mulai tahun 2023 sampai dengan

tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2023

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

DRAF KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 188/xx/423.011/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
(STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT/STU)
DI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Walikota Nomor xxx tahun xxx tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 73 tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 maka perlu membentuk Tim Pengelola reformasi Birokrasi Internal/Strategic Transformation Unit (STU) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelola reformasi Birokrasi Internal/Strategic Transformation Unit (STU) di Pemerintah Kota Pasuruan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan walikota Ini akan dibebankan pada Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
- KEEMPAT : Biaya sebagaimana pada Diktum keempat agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan kinerja.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2023

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan;
 2. Inspektur Kota Pasuruan;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan; dan
 4. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/xx /423.011/2023
TIM PENGELOLA REFORMASI
BIROKRASI INTERNAL (STATEGIC
TRANSFORMATION UNIT/STU)
DI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
(STATEGIC TRANSFORMATION UNIT/STU)
DI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DAAM JABATAN
1	2	3
A	TIM STU/KESEKRETARIATAN 1. Ketua 2. Anggota	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Asisten 1 Asisten 2
B	TIM RB GENERAL 1. Ketua 2. Anggota	Asisten Administrasi Umum (Asisten 3) 1. Kepala Bapelitbangda 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangann dan Aset 3. Inspektorat 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 5. Kepala Dinas Komunikasi informasi dan statistik 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan 7. DPMPTSP 8. Kepala Bagian Organisasi 9. Kepala Bagian Hukum 10. Kepala Bagian Pengadaan barang dan jasa
C	TIM RB TEMATIK PENANGANAN KEMISKINAN 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Bapelitbangda 1. Kepala Dispendik 2. Kepala Dinas sosial 3. Kepala Disnaker 4. Kepala Diskominfo 5. kepala Dinkop 6. Kepala DPMPTSP 7. Kepala Dinas PUPR 8. Camat dan Lurah
	PENINGKATAN INVESTASI 1. Ketua	Kepala DPMPTSP

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DAAM JABATAN
1	2	3
	2. Anggota	1. Kepala Disperindag 2. Kepala Dinas Pertanian 3. Kepala Disnaker 4. kepala Dinkop 5. Kepala Perikanan 6. Kabag Hukum
	PENANGANAN INFLANSI 1. Ketua 2. Anggota	Bagian Perekonomian 1. Kepala Disperindag 2. Kepala Dinas Pertanian 3. Kepala Dishub 4. kepala Dinkop 5. Kepala Perikanan 6. Kepala Dinas PUPR 7. Kepala diskominfo 8. inspektorat
	DIGITALISASI (PENANGANAN STUNTING) 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Kepala Dispendik 2. Kepala Dinas sosial 3. Kepala DPA3KB 4. Kepala Diskominfo 5. Kepala Dinas Perikanan 6. Kepala Pertanian 7. Kepala Dinas PUPR 8. Camat dan Lurah
	P3DN 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Disperindag 1. Kepala Dinas Pertanian 2. Kepala Disnaker 3. Kepala Dinkop 4. Kepala Perikanan 5. Kepala Diskominfo 6. Kepala Bagian PBJ 7. Seluruh OPD
D	TIM EVALUASI 1. Ketua 2. Anggota	Inspektur 1. Irba wilayah I 2. Irban wilayah II 3. Irban Wilayah III 4. Irban Investigasi

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SAIFULLAH YUSUF

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL
(STATEGIC TRANSFORMATION UNIT/STU)
DI PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

I. TUGAS TIM KESEKRETARIATAN

- a. Memberikan arahan/masukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik;
- b. Melaksanakan koordinasi pada lintas Tim;
- c. Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi dari tim evaluasi Reformasi Birokrasi.

II. TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja/Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional yang dapat memberikan dampak luas kepada masyarakat;
- c. Menyusun rencana aksi pada masing masing indicator Reformasi Birokrasi yang diampu;
- d. Melaksanakan *Road Map* dari program-program prioritas yang telah ditetapkan pada rencana aksi; *dan*
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

III. TUGAS TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

- a. Melaksanakan pendampingan terhadap rencana aksi RB General dan RB Tematik;
- b. Melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan rencana aksi RB General dan Tematik;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023- 2023 yang telah ditetapkan.
- d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Tim STU/Kesekretariatan.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

